


# KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



## KOMPILASI KLIPING MEDIA CETAK KEMENTERIAN PERTANIAN RI

05 JUNI 2024

-Biro Humas dan Informasi Publik-

|        |                                    |  |
|--------|------------------------------------|--|
| Title  | Petani Masih Butuh Perhatian Lebih | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                        |  |
| Media  | Koran Jakarta                      |  |
| Page   | 6                                  |  |
| Author | Ers/E-10                           |  |

Produksi Pangan | Masalah Pupuk, Biaya Transportasi Jadi Momok bagi Petani

# Petani Masih Butuh Perhatian Lebih

Petani kerap di posisi paling lemah dalam rantai pangan nasional lantaran mereka tak menikmati keuntungan saat harga beras naik, tetapi daya beli melemah terimbas deflasi pangan.

JAKARTA - Pemerintah jangan lengah dengan adanya deflasi bahan pokok beras pada Mei 2024. Regulator harus tetap menekan biaya produksi agar tidak memberatkan petani sebagai produsen pangan.

"Beras perlu dicermati harga yang tinggi secara tahunan, dan tetap memerlukan intervensi menekan biaya produksi. Jangan lengah soal deflasi beras secara bulanan, masalah pupuk, biaya transportasi masih jadi momok bagi petani," tegas Direktur Celios, Bhima Yudisthira, kepada *Koran Jakarta*, merespons laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal deflasi beras pada Mei 2024.

Menurut Bhima, kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras belum menjadi solusi bagi petani. Saat ini, HET beras naik menjadi 14.900 rupiah per kilogram (kg) dari 13.900 per kg.

Karenanya, dia mendesak pemerintah menggelontorkan subsidi pupuk lebih besar lagi, subsidi transportasi dan memangkas rantai pasok. Langkah tersebut diharapkan menjadi prioritas baik jangka pendek dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.

"Tahun depan, kita tidak tahu apakah biaya produksi beras akan naik lebih tinggi, mencermati pelemahan kurs rupiah yang mempengaruhi harga pupuk," ujarnya.

Namun, lanjut Bhima, harga beras turun memberi efek kepada nilai tukar petani (NTP) yang turun pada Mei 2024, khususnya subsektor tanaman pangan.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan harga beras terus turun di berbagai tingkatan, mulai dari

penggilingan, grosir, hingga eceran, menjadikan beras sebagai penyumbang utama deflasi pada Mei 2024.

Dalam konferensi pers di Jakarta, awal pekan ini, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widiasanti, menuturkan ra-

« Beras perlu dicermati harga yang tinggi secara tahunan, dan tetap memerlukan intervensi menekan biaya produksi. »

**BHIMA YUDISTHIRA**  
Direktur Celios

ta-rata harga beras di penggilingan pada Mei 2024 turun 4,41 persen secara bulanan, tetapi naik 10,71 persen secara tahunan.

Berdasarkan data BPS, harga beras di penggilingan pada April 2024 tercatat 13.012 rupiah per kg, dan turun menjadi 12.438 rupiah pada Mei 2024.

Pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03 persen secara bulanan atau *month to month* (mtm). Dalam hal ini, inflasi beras mengalami penurunan tiga bulan beruntun.

"Beras telah mengalami deflasi sebesar 3,59 persen dengan andil deflasi inti sebesar 0,15 persen," sebut Amalia.

Ditambahkannya, meskipun produksi beras mulai turun, deflasi komoditas beras kembali terjadi karena stok beras yang tersedia masih memadai. Secara umum, di 29 provinsi mengalami deflasi beras, sedangkan satu provinsi stabil dan delapan provinsi mengalami inflasi beras.

Amalia mengungkapkan harga gabah pada Mei 2024 ini juga tercatat turun secara bulanan (mtm), antara lain Gabah Kering Panen (GKP) harganya mengalami penurunan 2,73 persen secara bulanan, namun naik 4,64 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.


"Kemudian, gabah kering giling turun sebesar 4 persen mtm dan naik sebesar 8,4 persen yoy," kata Amalia.

## Jaminan Harga

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarnajmi, menyatakan daya beli petani yang terindikasi dari nilai tukar petani (NTP) bisa naik apabila ada jaminan harga. "Jaminan harga yg memastikan keuntungan untuk petani," tegasnya.

Kemudian, kata Qomar, upaya lain untuk meningkatkan NTP yakni terkait pemasaran hasil pertanian, lalu peningkatan posisi tawar petani serta memfasilitasi penguatan kelembagaan tani. Hal tersebut menjadi hal penting bagi penguatan posisi petani ini.

■ ers/E-10

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Kinerja Ekspor Jakarta Anjlok 30 Persen | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                             |  |
| Media  | Koran Jakarta                           |  |
| Page   | 8                                       |  |
| Author | Ant/G-1                                 |  |

## Kinerja Ekspor Jakarta Anjlok 30 Persen

JAKARTA - Sepanjang bulan April lalu, kinerja ekspor Provinsi Jakarta menurun drastis sampai hampir 30 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jakarta mencatat penurunan itu dibanding bulan Maret 2024.

Ekspor Jakarta bulan April hanya 805 juta dollar AS, sedangkan Maret mencapai 1,12 miliar dollar AS. “Jadi, menurun hampir 30 persen,” tandas Kepala BPS Jakarta, Dwi Paramita Dewi, Selasa. Dwi merinci penurunan ekspor April didorong oleh turunnya ekspor nonmigas yang ditopang oleh hasil industri pengolahan.

Berdasarkan catatan BPS, ekspor nonmigas turun sebesar 29,5 persen menjadi 802 juta dollar AS. Ekspor industri pengolahan yang memiliki andil terhadap total ekspor Jakarta, sebesar 94,82 persen berkontraksi sebesar 28,93 persen dengan nilai ekspor mencapai 763,31 juta dollar AS.


Selain industri pengolahan, ekspor pertanian dan pertambangan juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 39,20 persen dan 41,36 persen. Di sisi lain, ekspor migas meningkat 3,81 persen menjadi 3,04 juta dollar AS. Kenaikan ekspor migas ini terjadi pada kelompok bahan bakar mineral.

Jika dilihat dari komoditas unggulan yang memiliki nilai dan “share” tertinggi, komoditas ini mengalami penurunan ekspor, yakni logam mulia dan perhiasan/permata, mesin, peralatan mekanis serta bagiannya. Kemudian, kelompok ikan, krustasea dan moluska.

Nilai ekspor logam mulia dan perhiasan/permata pada April mencapai 220 juta dollar AS dengan andil 27,35 persen mengalami penurunan secara bulanan.

Namun, ekspor komoditas ini mengalami peningkatan 168,36 persen secara tahunan terhadap April 2023.

BPS juga mencatat ekspor kumulatif sampai dengan April sebesar 3,55 miliar dollar AS. Ini naik sebesar 1,86 persen dibanding periode yang sama pada 2023. Tujuan utama ekspor antara lain India. ■ **Ant/G-1**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Stuktur Fiskal Belum Berada di Jalur yang Sehat | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                                     |  |
| Media  | Koran Jakarta                                   |  |
| Page   | 1   |  |
| Author | YK/SB/ers/E-9                                   |  |

Keuangan Negara | Maraknya Praktik Korupsi Menunjukkan APBN Belum Kredibel

# Struktur Fiskal Belum Berada di Jalur yang Sehat

» Kasus korupsi dan penyalahgunaan anggaran menunjukkan bahwa sistem pengawasan masih lemah.

JAKARTA - Pemerintah dinilai akan kesulitan merealisasikan strategi kebijakan fiskal, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah panjang, jika desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih seperti saat ini di mana terjadi pemborosan uang negara di berbagai pos belanja.

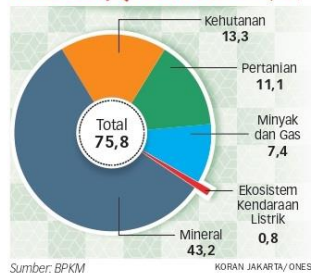
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan program hilirisasi tetap menjadi bagian dari strategi kebijakan fiskal jangka menengah-panjang. Selain itu juga perlu penguatan sumber daya manusia, transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Adapun dalam jangka pendek, fiskal diarahkan menjaga keberlanjutan program prioritas, termasuk penguatan program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan individu, serta konvergensi antardaerah.

"Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlu ditopang APBN yang efisien, sehat, dan kredibel," katanya.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, yang

## Realisasi Investasi Sektor Hilirisasi, Q1-2024 (triliun rupiah)



Sumber: BPKM

KORAN JAKARTA/ONES

dihubungi di Yogyakarta, Selasa (4/6), mengatakan formulasi APBN saat ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Hal itu bahkan bisa dilihat publik secara kasat mata karena Presiden Jokowi sering mengungkapkan masih banyaknya pemborosan APBN untuk kegiatan-kegiatan yang tidak perlu.

"Berulang kali kan Presiden bilang soal pemborosan. Anggaran *stunting* habis untuk rapat dan bangun pagar kelurahan. Tahun lalu, soal anggaran perjalanan dinas, dan Mei ini Presiden mengungkap soal pusat dan daerah habis 6,2 triliun rupiah untuk bikin aplikasi," kata Aditya.

Mengenai aplikasi sebenarnya hal itu terjadi sejak dulu, yakni pemerintah sering membuat duplikasi program antarkementerian dan lembaga yang hanya mengejar *output* dan laporan

beres ketimbang *outcome* yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dikeluarkan.

Sementara dari sisi kesehatan fiskal APBN, jelas Aditya, saat ini masih terlalu bergantung pada utang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Rasio utang terhadap PDB yang terus meningkat bisa menimbulkan risiko fiskal yang signifikan di masa depan, terutama jika pertumbuhan ekonomi melambat.

"Meski defisit anggaran bisa dimaklumi dalam situasi tertentu, defisit yang terus-menerus tanpa ada upaya pengendalian yang jelas menunjukkan bahwa struktur fiskal belum berada pada jalur yang sehat," jelas Aditya.

Dengan masih banyaknya pemborosan anggaran dan masih maraknya praktik korupsi terhadap keuangan negara menunjukkan bahwa sebenarnya APBN jauh dari kredibel. Masih banyak kebijakan fiskal yang kurang transparan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan sulit untuk menilai ke mana sebenarnya uang negara digunakan.

Contoh terkini di depan mata adalah anggaran Kementerian Pertanian yang jelas-jelas untuk mendukung sektor pertanian, bahkan nyatanya habis disedot eks Menteri Pertanian dan kroninya beserta pejabat-pejabat eselon I, termasuk untuk mengundang penyanyi dangdut.

"Jadi belum kredibel APBN kita. Sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran masih belum optimal. Kasus korupsi dan penyalahgunaan anggaran menunjukkan bahwa sistem

pengawasan masih lemah. Bahkan BPK saja terlibat dalam korupsi, bagaimana mau kredibel," papar Aditya.

Dari sisi penerimaan, struktur pendapatan negara masih sangat tergantung pada pajak tambang. Dengan kebergantungan negara pada pajak dan sumber daya alam sering kali bersifat *volatile*, karena bergantung pada kondisi ekonomi global, maka membuat penerimaan negara kurang stabil dan dapat mengganggu perencanaan anggaran jangka panjang.

"Terakhir, subsidi yang belum tepat sasaran. Subsidi LPG bagaimana? Subsidi pertalite? Subsidi solar? Subsidi BLT? Semua masih banyak lobangnya," tandas Adit.

## Sangat Klasik

Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdusalam, mengatakan, saat ini struktur APBN masih sangat klasik dan jauh dari progresif untuk melahirkan APBN yang berdimensi masa depan berkelanjutan.

"Hal yang membuat APBN tidak efisien terutama porsi belanja pegawai dan operasional birokrasi kita yang masih cukup besar, sementara untuk pengembangan dan ekapansi program pembangunan masih minim," kata Surokim.

Anggaran sektor-sektor strategis yang menguatkan sektor publik belum sesuai harapan. Pemerintah sampai saat ini belum maksimal dalam mendesain struktur anggaran yang efisien sehat dan kredibel. ■ YK/SB/ers/E-9

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN


|        |                     |  |
|--------|---------------------|--|
| Title  | Dinyatakan Sehat    | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024         |  |
| Media  | Koran Jakarta       |  |
| Page   | 8                   |  |
| Author | Antara/Riski Syukur |  |

## » Dinyatakan Sehat



ANTARA/RISKY SYUKUR

» Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat menyerahkan sertifikat sehat kepada penjual hewan kurban di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Senin (3/6).

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | ANCANG-ANCANG HADAPI RISIKO CUACA EKSTREM | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                               |  |
| Media  | Bisnis Indonesia                          |  |
| Page   | 6   |  |
| Author | Nugroho Nafika Kassa                      |  |

| INFLASI PANGAN |

# ANCANG-ANCANG HADAPI RISIKO CUACA EKSTREM

Berbagai upaya yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sukses menekan lonjakan harga pangan pada Mei 2024. Namun, sejumlah langkah pengendalian tak boleh berhenti lantaran adanya risiko cuaca ekstrem pada paruh kedua tahun ini yang berisiko mendorong laju inflasi ke level tinggi.

Nugroho Nafika Kassa  
redaksi@bisnis.com

**P**emerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) pun tetap masih menegatkan kontrol terhadap harga komoditas di pasaran, meski telah sukses menekan lonjakan harga pangan pada Mei 2024 hingga terjadi deflasi bulanan 0,1%.

Hal ini lantaran adanya ancaman kekeringan yang diproyeksi kembali melanda wilayah ini, yang diperkirakan dapat membuat harga komoditas pertanian kembali melambung tinggi.

Penjabat (Pj.) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa sebagai upaya pengendalian inflasi

sepanjang tahun ini, pihaknya berencana akan memberikan subsidi langsung ke pedagang atau distributor.

Upaya ini, imbuhnya, merupakan bentuk pengendalian harga secara langsung ke masyarakat, jika harga naik, para pedagang yang bisa saja melambung sewaktu-waktu, diharapkan tidak terjadi di tingkat pedagang apabila subsidi ini diterapkan.

"Subsidi ini bisa bentuknya untuk transportasi. Jadi nantinya petani pun juga tidak dirugikan, jika harga naik, para distributor tetap bisa membelinya secara wajar, karena akan dapat subsidi," jelasnya pada pertemuan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Makassar, Selasa (4/6).

Selain pemberian subsidi ke pedagang dan distributor, Pemprov Sulsel juga akan mengencakan pelaksanaan pasar murah.

Seperti agenda tahun sebelumnya, pasar murah 2024 juga dirancang akan digelar di beberapa kabupaten/kota dengan pelaksanaan rutin.

"Kalau masyarakat yang dekat dengan pasar akan mendapatkan keterjangkauan harga, karena pedagang dan distributornya dapat subsidi. Pasar murah ini dilaksanakan untuk melayani masyarakat yang jauh dari pasar," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHbun) Sulsel Imran Jausi menambahkan, pihaknya juga akan melakukan

antisipasi pengendalian harga dari sisi hulunya dengan optimalisasi lahan.

Hal tersebut, imbuhnya, dilakukan guna meningkatkan siklus penanaman pada tahun ini.

Pihaknya juga telah menyiapkan lahan seluas 13.648 hektare (ha) berupa lahan rawa yang akan dioptimalisasi.

Dia memandang bahwa lahan ini bisa meningkatkan penanaman yang sebelumnya hanya satu kali dalam setahun, bisa menjadi dua kali.

"Selain itu kami juga mulai mencoba padi gogo atau padi yang ditanam di kebun maupun ladang. Kelebihan padi gogo adalah tidak memerlukan irigasi khusus, jadi kebutuhannya airnya tidak lebih banyak dibandingkan dengan padi sawah," jelasnya.

## CUACA EKSTREM

Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (KPwBI Sulsel) mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda wilayah ini pada kuartal III/2024 dan kuartal IV/2024 bisa menjadi tantangan utama inflasi Sulsel.

Kepala KPwBI Sulsel Rizky Emadi Wimanda menjelaskan bahwa apabila kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, maka bisa memengaruhi produksi beberapa komoditas utama yang kerap menjadi penyumbang inflasi terbesar, seperti beras dan ikan bandeng. Dia mengatakan bahwa potensi penurunan produksi beras akibat kondisi cuaca ekstrem menjadi ancaman pengendalian inflasi Sulsel tahun ini.

Apalagi, imbuhnya, penyerapan cadangan

beras pemerintah (CBP) baru terlaksana di sembilan kabupaten/kota.

Selain itu, dia menilai bahwa perubahan suhu muka air secara ekstrem bisa memengaruhi produksi ikan bandeng.

Padahal, ikan bandeng dan beras diketahui selalu menjadi penyumbang inflasi paling besar di wilayah ini. Artinya, jika produksi dua komoditas ini terhambat, maka inflasi Sulsel sulit terkendali.

Oleh karena itu, Bank Indonesia merekomendasikan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret terkait dengan tantangan itu.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan a.l dengan menggenjot ketersediaan pangan melalui penguatan CBP khususnya pada periode panen raya hingga penguatan budi daya ikan bandeng selama beberapa waktu ke depan.

"Dua komoditas itu memang sangat berpengaruh mengingat menjadi yang cukup banyak dikonsumsi masyarakat Sulsel. Namun strategi lain juga tetap perlu, seperti mendorong penerapan pertanian *green house*, khususnya untuk produk hortikultura sampai realisasi kerja sama antar daerah [KAD]," jelasnya, Selasa (4/6).

Selain itu, KPwBI Sulsel juga merekomendasikan beberapa strategi terkait dengan keterjangkauan harga dengan pembentukan neraca pangan di seluruh kabupaten/kota, melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM), perluasan *Mini Distribution Center* (MDC), serta operasi pasar yang



**Apabila kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, maka bisa memengaruhi produksi beberapa komoditas utama yang kerap menjadi penyumbang inflasi terbesar, seperti beras dan ikan bandeng.**

terstruktur, masif dan serentak. "Strategi ini menjadi yang paling *urgent* bisa kami lakukan jika ketersediaan pasokan mulai menipis yang bisa membuat harga melambung. Tujuannya untuk mengantisipasi kenaikan harga dalam jangka pendek," jelasnya.

Selain itu, Rezky juga menekankan perlunya kelancaran distribusi sepanjang tahun ini. Sinergi TPID dengan satgas pangan, termasuk perubahan untuk memonitor kelancaran distribusi komoditas strategis perlu dipertajam. Hal tersebut bisa sejalan dengan perluasan program Sipeppa (kerja sama distributor dengan asosiasi toko ritel/kelontong). □



Inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Selatan makin terkendali dengan capaian 2,42% pada Mei 2024. Namun, risiko cuaca ekstrem pada semester II/2024 perlu menjadi perhatian khusus pemangku kepentingan terkait.



## Top 5 Komoditas Turun Harga Andil Inflasi Mei Sulawesi Selatan

| Jenis Komoditas          | Andil (%) |
|--------------------------|-----------|
| Ikan Bandeng/ikan bolu   | -0,12     |
| Bahan bakar rumah tangga | -0,04     |
| Tempe                    | -0,03     |
| Ikan teri                | -0,03     |
| Ayam hidup               | -0,02     |

## Top 5 Komoditas Naik Harga Andil Inflasi Mei Sulawesi Selatan

| Jenis Komoditas      | Andil (%) |
|----------------------|-----------|
| Beras                | 0,45      |
| Emas Perhiasan       | 0,3       |
| Sigaret Kretek Mesin | 0,23      |
| Tomat                | 0,15      |
| Cabai Rawit          | 0,15      |

## Top 5 Struktur Perekonomian & PDRB Sulawesi Selatan Kuartal I/2024


| Lapangan Usaha         | Porsi (%) | PDRB Tahunan (%) |
|------------------------|-----------|------------------|
| Pertanian              | 21,2      | -3,72            |
| Perdagangan            | 14,68     | 8,61             |
| Industri Pengolahan    | 13,41     | 5,08             |
| Konstruksi             | 12,75     | 2,14             |
| Informasi & Komunikasi | 5,58      | 7,3              |

Sumber: BPS Sulsel

BISNIS/SINTA NOVIZAH

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMANTAN**

|        |                      |  |
|--------|----------------------|--|
| Title  | CPO Terdesak Pesaing | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024          |  |
| Media  | Bisnis Indonesia     |  |
| Page   | 14                   |  |
| Author | Sri Mas Sari         |  |

| MINYAK NABATI |

# CPO Terdesak Pesaing

Bisnis, JAKARTA — Minyak kelapa sawit mengalami penurunan terdalam dalam hampir satu tahun terakhir, mengikuti penurunan yang baru-baru ini terjadi pada minyak kedelai dan minyak mentah.

Penurunan komoditas substitusi dan komplementer itu menjadikan CPO kurang menarik untuk digunakan sebagai bahan bakar hayati alias *biofuel*.

Harga CPO pengiriman Agustus di Bursa Derivatif Malaysia 4,3% menjadi 3.902 ringgit per ton pada Selasa (4/6) pukul 16.48 WIB, penurunan harian terdalam sejak akhir Juni tahun lalu. Koreksi ini menghapus sebagian besar kenaikan harga CPO yang menembus level psikologis 4.000 ringgit minggu lalu seiring dengan lonjakan ekspor Malaysia.

Minyak kedelai, pengganti terdekat bagi kelapa sawit untuk makanan dan bahan bakar,

menghentikan penurunannya setelah anjlok 3% di Chicago Board of Trade (CBOT). Sementara, minyak mentah memperpanjang penurunan dari level terendah dalam hampir empat bulan setelah rencana OPEC+ mengembalikan sebagian barel ke pasar yang lebih awal dari perkiraan menimbulkan kekhawatiran mengenai kelebihan pasokan.

“Pelemahan harga minyak mentah semalam [Senin malam] dan penurunan harga minyak nabati di AS dan China membebani harga minyak sawit,” kata Gnanasekar Thiagarajan dari Kaleesuwari Intercontinental Ltd, dikutip *Bloomberg*.

Dia menambahkan, minyak sawit dapat diperdagangkan antara 3.845—3.995 ringgit per ton minggu ini.

Sementara itu, stok minyak sawit di Malaysia pada Mei naik 2,3% dari bulan sebe-


lumnya menjadi 1,78 juta ton, menurut perkiraan median dari 12 eksekutif perkebunan, pedagang, dan analis yang disurvei oleh *Bloomberg*. Kenaikan ini akan menjadi peningkatan cadangan dua bulan berturut-turut, sekaligus lebih tinggi 5% *year-on-year*.

Pada waktu yang sama, ekspor melonjak 14% menjadi 1,4 juta ton, menurut survei. Data resmi akan dirilis oleh Dewan Minyak Sawit Malaysia pada 10 Juni.

Nagaraj Meda, Direktur Pelaksana TransGraph Consulting yang berbasis di Hyderabad, India, mengatakan, bersamaan dengan pertumbuhan produksi musiman, stok minyak sawit Malaysia kemungkinan akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Dia memperkirakan harga akan bertahan antara 3.700—4.300 ringgit per ton dalam beberapa minggu mendatang. *(Sri Mas Sari)*

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

|        |                               |  |
|--------|-------------------------------|--|
| Title  | Kebutuhan Tinggi Pasar Jepang | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                   |  |
| Media  | Bisnis Indonesia              |  |
| Page   | 18                            |  |
| Author | K34                           |  |

## | EKSPOR GEDONG GINCU |

# Kebutuhan Tinggi Pasar Jepang

Bisnis, BANDUNG — Kebutuhan tinggi pasar Jepang atas produk buah mangga gedong gincu memberikan peluang besar bagi para petani asal Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan taraf hidupnya.

Setidaknya, dalam satu tahun, Jepang membutuhkan pasokan 1.200 ton Mangga Gedong Gincu dari Sumedang.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan *stakeholder* terkait tengah melakukan sejumlah langkah percepatan persiapan untuk menangkap peluang tersebut.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Sumedang Sajidin mengatakan, saat ini lahan mangga gedong Gincu di Kabupaten Sumedang adalah 3.600 hektare (ha).

Dia menjelaskan, luas tanam ini diperkirakan tidak akan

mampu memenuhi kebutuhan ekspor itu.

Oleh sebab itu, imbuhnya. pihaknya harus kerja sama dengan kabupaten lain seperti Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka guna memenuhi permintaan pasar Jepang.

Sajidin mengungkapkan bahwa saat ini juga pihaknya mendapat dukungan untuk menunjang syarat higienitas produk mangga gedong gincu tersebut dengan membangun infrastruktur yang dinamakan *vapour heat treatment* (VHT).

“Ada metode tersendiri untuk lebih meningkatkan kehygienisan dengan metode intervensi uap panas. Mengingat soal higienitas, Jepang sangat ketat untuk ini,” kata Sajidin.


Rencananya, VHT tersebut akan dibangun di lahan seluas 6.000 meter persegi di bekas

Pasar Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang.

“Tempat ini akan dibangun di Tolengas sehingga mangga dari berbagai kecamatan seperti Tomo, Ujungjaya, Jatigede akan disterilkan di tempat yang dinamakan VHT, dikemas kemudian siap diangkut untuk diekspor ke Jepang,” jelasnya.

Ia pun berharap bahwa serangkaian upaya untuk memudahkan produk agrikultur unggulan Kabupaten Sumedang tersebut dapat memperlancar ekspor ke pasar global.

“Jepang membutuhkan buah-buahan dari negara tropis akan tetapi rata-rata harganya mahal sehingga dicari untuk dibeli yang murah. Terlebih Jepang mempunyai program menghadirkan buah-buahan tropis untuk rumah tangga sehingga anak-anak diwajibkan memakan buah-buahan,” katanya. (K34)

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Pemerintah Antisipasi Penimbunan MinyakKita | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                                 |  |
| Media  | Bisnis Indonesia                            |  |
| Page   | 7   |  |
| Author | Dwi Rachmawati                              |  |

| PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI |

# Pemerintah Antisipasi Penimbunan MinyakKita

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perdagangan meminta Dinas Perdagangan di daerah memastikan pasokan MinyakKita tetap aman di tengah rencana pemerintah menyesuaikan harga eceran tertinggi komoditas tersebut.

Bambang Wisnubroto, Direktur Bahan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan mengakui bahwa rencana pemerintah menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) MinyakKita telah memicu aksi penimbunan di daerah.

Hal itu membuat pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas terkait di daerah untuk mengamankan pasokan MinyakKita di tengah masyarakat, dan memastikan tidak ada distributor yang melakukan

penimbunan.

“Kami mohon bantuan dari dinas di daerah seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan di distributor di wilayah tersebut untuk memastikan tidak ada distributor yang menahan barang [MinyakKita],” katanya, Selasa (4/6).

Bambang menjelaskan bahwa penyesuaian HET MinyakKita diperlukan untuk menjamin kelancaran distribusi komoditas tersebut di pasar. Kenaikan HET MinyakKita pun telah disepakati oleh asosiasi produsen minyak kelapa sawit dan minyak goreng.

Selain berencana menyesuaikan HET MinyakKita, pemerintah juga berencana mengevaluasi kebijakan *domestic market obligation* (DMO) minyak goreng rakyat. Evaluasi

kebijakan DMO dilakukan seiring dengan rendahnya realisasi DMO dan kondisi pasar ekspor yang melemah.


Data Kemendag mencatat, realisasi DMO minyak goreng rakyat pada Mei 2024 sebanyak 159.121 ton atau 53,04% dari target 300.000 ton. Secara terinci, sebanyak 103.603 ton DMO disalurkan dalam bentuk MinyakKita, dan 56.058 ton dalam bentuk curah.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat mengusulkan agar HET MinyakKita naik sebesar Rp1.500 per liter, dari sebelumnya Rp14.000 per liter menjadi Rp15.500 per liter.

Menurutnya, HET MinyakKita sudah waktunya dinaikkan mengingat pemerintah belum melakukan penyesuaian sejak 2022. *(Dwi Rachmawati)*

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN

|        |                              |  |
|--------|------------------------------|--|
| Title  | PERMINTAAN HEWAN KURBAN NAIK | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                  |  |
| Media  | Bisnis Indonesia             |  |
| Page   | 18                           |  |
| Author | Bisnis/Rachman               |  |


## ■ PERMINTAAN HEWAN KURBAN NAIK



*Bisnis/Rachman*

**Tenaga Pemasar** memberi pakan hewan kurban domba di pusat peternakan kurban Rumah Zakat di Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa

(4/6). Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat memperkirakan permintaan hewan kurban akan mengalami kenaikan 15% pada tahun ini.

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Pemkab Lebak Optimalkan Irigasi dan Pompanisasi | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                                     |  |
| Media  | Indo Pos  |  |
| Page   | 6   |  |
| Author | Wib   |  |

# Pemkab Lebak Optimalkan Irigasi dan Pompanisasi

**INDOPOSCO** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mengoptimalkan sarana irigasi dan program pompanisasi untuk memacu perluasan areal tanam guna menghadapi musim kemarau berkepanjangan.

“Kita berharap melalui irigasi dan pompanisasi itu bisa meningkatkan perluasan areal tanam dari dua musim tanam menjadi tiga musim tanam dalam setahun,” kata Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar seperti dikutip Antara, Selasa (4/6/2024).

Perluasan tanam tersebut guna mengantisipasi musim kemarau berkepanjangan sehingga dioptimalkan sarana irigasi dan program pompanisasi. Mereka petani di 28 kecamatan di Kabupaten Lebak gencar melakukan gerakan percepatan tanam.

Sebab, pengoptimalan sarana irigasi dan pompanisasi dapat memenuhi ketersediaan pasokan air.

Bahkan, Pemerintah Kabupaten Lebak kini melakukan pemasangan pompa di sejumlah areal persawahan yang masuk kategori sawah tadah hujan dengan pompa satelit.

“Kami mengapresiasi pompa satelit itu bisa mengaliri areal seluas 50-75 hektare,” kata Deni.

Menurut dia, sarana irigasi dan program pompanisasi sangat membantu percepatan areal perluasan tanam untuk mendukung kebijakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menghadapi musim kemarau berkepanjangan.

Kementan telah memberikan bantuan pompa sebanyak 263 unit kepada kelompok tani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan guna mensukseskan areal perluasan tanam.

Pemerintah daerah menargetkan angka perluasan tanam pada Juni 2024 seluas 10.000 hektare dan panen September mendatang.



**Dinas Pertanian Kabupaten Lebak mengoptimalkan pompanisasi guna mendukung areal perluasan tanam menghadapi mitigasi kemarau berkepanjangan.**

Sedangkan, target angka tanam pada Mei 2024 lalu terealisasi 10.000 hektare.

“Kami mendorong kelompok tani agar mengoptimalkan sarana irigasi dan pompanisasi,” jelas dia.

Mohammad Ikbal, Ahli Muda Teknik Sumber Daya Alam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak mengoptimalkan sebanyak 463 unit Daerah Irigasi (DI) dengan tiga kali tanam untuk meningkatkan produksi pangan di daerah itu.

Pemerintah Kabupaten Lebak komitmen

untuk mendukung produksi pangan sehingga jaringan infrastruktur irigasi sebagai penyedia pasokan air tentu menjadi skala prioritas pembangunan.


Saat ini, jumlah sarana infrastruktur irigasi tercatat 463 unit DI dengan areal persawahan seluas 47 ribu hektare.

Namun, kondisi jaringan irigasi yang baik sebanyak 259 unit DI dan sisanya dalam kondisi kurang dan jelek.

“Kami tahun ke tahun memperbaiki jaringan irigasi guna mendukung program pangan nasional,” katanya. (wib)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Pemprov Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Iduladha | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                                       |  |
| Media  | Indo Pos  |  |
| Page   | 6   |  |
| Author | Yas   |  |

# Pemprov Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Iduladha

**INDOPOS.CO** - Penjabat (PJ) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan tingkat inflasi di Provinsi Banten cukup terkendali dengan baik.

Inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Banten pada Mei 2024 sebesar 2,86 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,05.

Hal itu diungkap Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (4/6/2024). Rapat dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Da-

laman Negeri Republik Indonesia Tomsitohir. "Sebelumnya inflasi Provinsi Banten cukup fluktuatif. Saat ini kita telah mendekati situasi yang baik di 2,86 persen," ungkapnya.

"Artinya ada penurunan yang signifikan, kita intens menggerakkan langkah-langkah bersama dengan

Bupati dan Walikota," sambung Al Muktabar.

Dikatakan, komoditi yang menjadi penyumbang inflasi di Provinsi Banten, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai merah dan komoditi lainnya.

"Sementara pada aspek pangan khususnya beras, Provinsi Banten sebagai daerah yang berkontribusi pada pangan secara nasional. Beberapa waktu lalu sampai saat ini masih panen raya, sehingga beras relatif mulai terkendali," kata Al Muktabar.

Dijelaskan, menjelang momen Hari Besar Keagamaan Idul Adha 2024, pihaknya melakukan antisipasi kenaikan harga 20 komoditas pangan yang memicu kenaikan angka inflasi di daerah.

"Sebentar lagi ada hari besar keagamaan, di mana tingkat kebutuhan akan mengalami peningkatan, mulai dari daging, daging ayam ras, telur

dan lainnya yang masuk dalam 20 komoditas pangan. Maka kita akan terus menggiatkan hal-hal untuk mengantisipasi kenaikan harga," pungkasnya.

#### Terkendali

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 26/06/36/Th. XVIII, 3 Juni 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Banten pada Mei 2024 sebesar 2,86 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,05. Mengalami penurunan dibandingkan bulan April 2024 yang mencapai 3,42 persen.

Pada bulan Mei 2024, terjadi deflasi m-to-m sebesar 0,52 persen, inflasi y-on-y sebesar 2,86 persen dan inflasi y-to-d sebesar 1,35 persen.

Penyumbang utama deflasi bulan Mei 2024 secara m-to-m adalah kelompok-kelompok makanan, mi-

numan dan tembakau transportasi dengan andil -0,51 persen dan kelompok transportasi dengan andil -0,09 persen. Komoditas penyumbang utama deflasi antara lain beras, daging ayam ras, tomat, angkutan antar kota, dan bawang merah.

Inflasi di Provinsi Banten pada Mei 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,23 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,64 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,29 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,23 persen.


Penyumbang inflasi lainnya di Provinsi Banten dari kelompok kesehatan sebesar 1,05 persen, kelompok transportasi sebesar 0,95 persen, ke-



PJ Gubernur Banten Al Muktabar.

lompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,25 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,75 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,75 persen,

kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,16 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,14 persen. (yas)

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | Bapanas Konsisten Jalani Program Stabilitas Pangan | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024  |  |
| Media  | Rakyat Merdeka                                     |  |
| Page   | 10   |  |
| Author | NOV  |  |

## Kendalikan Inflasi Bapanas Konsisten Jalani Program Stabilitas Pangan



**Arief Prasetyo Adi**

PEMERINTAH terus berupaya menjaga dan mengendalikan inflasi, khususnya di sektor pangan. Upaya pengendalian inflasi dilakukan secara sinergis bersama Kementerian/Lembaga melalui berbagai langkah strategis.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, upaya tersebut bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan inflasi nasional secara tahun ke tahun (*year-on-year/yooy*) dari 3,00 persen bulan April 2024 menjadi 2,84 persen di Mei 2024.

Sementara secara bulanan (*month-to-month/mtm*), pada Mei 2024 mengalami deflasi sebesar 0,03 persen.

“Stabilisasi pangan menjadi salah satu kunci terjaganya laju inflasi pada Mei 2024 sesuai target Pemerintah 2,5 persen plus minus 1 persen,” ujar Arief dalam keterangan resminya, Selasa (4/6/2024).

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah serta berbagai *stakeholder* terkait lain, berkontribusi menjaga laju inflasi, sehingga tetap terkendali.

“Kita bisa melihat bentuk

komitmen bersama melalui *monitoring* dan evaluasi rutin setiap minggu bersama Kementerian Dalam Negeri dengan mengumpulkan seluruh Pemda, instansi dan *stakeholder* terkait,” ujar Arief.

Arief mengatakan, Bapanas juga terus berkomitmen menjaga stabilitas pangan dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Bukan hanya di aspek hilir yang berkaitan dengan konsumen, Pemerintah juga memperhatikan dari sektor hulu, bagaimana kesejahteraan produsen dalam hal ini petani peternak. Sebab, harga di hulu berkaitan erat dengan stabilitas harga di hilir.

“Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan berdasarkan laporan BPS pada Mei 2024, NTP masih terjaga di atas 100 poin meski mengalami penurunan dari bulan sebelumnya,” ujar Arief.

Dia juga mengatakan, kebijakan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras menjadi salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan harga hulu hilir.

“Ini tidak mudah. Namun menjadi tantangan yang harus kita hadapi sama-sama dengan menggandeng seluruh *stakeholder* terkait,” ujar Arief.

Untuk menjaga stabilitas pangan, Bapanas juga melakukan berbagai upaya strategis. Antara lain, melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dan penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah.

“Selain itu juga, penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022,” pungkask Arief. ■ NOV

|        |                         |  |
|--------|-------------------------|--|
| Title  | Diresmikan Naik Harga   | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024             |  |
| Media  | Rakyat Merdeka          |  |
| Page   | 1 Part 1                |  |
| Author | Budi Rahman Hakim, Ph.D |  |

CATATAN

**Budi Rahman Hakim, Ph.D.**

## **Diresmikan Naik Harga**

PER 1 Juni kemarin, pemerintah menetapkan kenaikan harga ecerah tertinggi (HET) untuk beras, baik medium maupun premium. Penetapan ini seperti peresmian. Sebab, sejak akhir 2023, harga beras di pasaran sebenarnya sudah naik. Per 1 Juni hanya deklarasi, diresmikan.


Angka kenaikan harga beras yang diresmikan cukup tinggi. Untuk beras medium, naik dari Rp 10.900 menjadi Rp 12.500 per liter. Berarti naiknya sebesar 12,4 persen. Jauh lebih tinggi dari kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) 2024, yang hanya sekitar 5 persen.

Untuk beras premium, naik dari Rp 13.900 menjadi Rp 14.900. Memang naiknya tak setinggi harga beras medium. Namun, hal ini akan tetap memberi tekanan besar. Sebab, sebelum peresmian kenaikan itu saja, harga beras premium di pasaran sudah di atas Rp 15.500. Jangan-jangan, setelah peresmian itu, harganya kembali merangkak, yang kemungkinan di kemudian hari akan diresmikan kembali kenaikannya.

Di satu sisi, peresmian kenaikan ini menguntungkan bagi petani. Mereka menjadi punya patokan dalam menjual gabah hasil panen. Dengan harga yang bagus, logikanya, mereka juga akan mendapatkan penghasilan yang bagus.

Sayangnya, kenyataan di lapangan

◆ BERSAMBUNG KE HAL 7

|        |                         |   |
|--------|-------------------------|---|
| Title  | Diresmikan Naik Harga   |  |
| Date   | 5 Juni 2024             |   |
| Media  | Rakyat Merdeka          |   |
| Page   | 1 Part 2                |   |
| Author | Budi Rahman Hakim, Ph.D |   |

# Diresmikan Naik Harga


... DARI HALAMAN 1

banyak yang tidak sesuai dengan logika tadi. Meski harga beras tinggi, kenaikan harga gabah petani tak signifikan. Apalagi jika ada isu impor beras, harga gabah di bawah langsung anjlok. Artinya, “hikmah” kenaikan harga beras kadang tak sampai ke petani kecil.

Di sisi lain, peresmian kenaikan ini jelas memupus harapan emak-emak bahwa harga beras akan normal kembali. Padahal, sebelumnya mereka

masih menyimpan asa harga beras akan turun. Harapan itu sempat membung tinggi saat pemerintah mengimpor beras. Namun, meski sudah lebih dari setengah juta ton diimpor, harga beras tak kunjung normal. Yang ada malah diresmikan kenaikannya.

Atas kondisi ini, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah menjaga harga beras agar tetap stabil. Ingat, stabilitas harga adalah hal yang diterima semua pihak. Petani dan emak-emak akan sepakat dengan hal itu. Sebab, dengan harga yang stabil, inflasi akan terjaga. ■

|        |                         |  |
|--------|-------------------------|--|
| Title  | Gibran Geber Peternakan | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024             |  |
| Media  | Rakyat Merdeka          |  |
| Page   | 4                       |  |
| Author | BSH                     |  |

# Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis Gibran Geber Peternakan

**Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka optimis, program makan bergizi gratis bakal sukses. Sejumlah persiapan terus dimatangkan. Salah satunya, melalui strategi memperbanyak peternakan penyedia bahan makanan.**

“ITU penting sekali ya (memperbanyak peternakan), semuanya, bukan cuma susu saja, telur ayam, semuanya,” kata Gibran, di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, kemarin.

Meski sudah mengonseptkan menambah peternakan di Indonesia, putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku belum berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian ihwal uji coba susu gratis. “Saya belum berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Nanti

coba kami komunikasikan ya. (Prioritas daerah 3T?) Belum tahu, saya belum komunikasi lagi,” katanya.

Wali Kota Solo ini mengapresiasi, berbagai pihak yang melakukan uji coba salah satu program unggulan Prabowo yang digaungkan dalam kampanye Pilpres 2024. Dengan berbagai percobaan, akan memunculkan skema terbaik ketika program tersebut berjalan. “Tapi sekali lagi ini program-

nya belum berjalan berbagai pihak sudah melakukan uji coba saya kira cukup baik untuk mencoba skema-skema yang berbeda. Skema yang terbaik bisa dieksekusi secara nasional. Ditunggu saja,” katanya.

Sebelumnya, Presiden terpilih, Prabowo Subianto mengubah nama rencana program ‘makan siang gratis’ menjadi ‘makan bergizi gratis’. Pengubahan dilakukan karena Prabowo menyadari bahwa para siswa, yang merupakan target program tersebut, masuk sekolah pagi dan pulang siang.

“Setelah kita pelajari ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya. Karena kalau anak SD masuk pagi, dia kalau tunggu

makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi, makanya kita ubah,” kata Prabowo.


Terkait pelaksanaannya, Prabowo menyebut pembagian makanan bergizi dan juga susu gratis kepada anak-anak di Indonesia akan disesuaikan dengan tipologi daerah. Jenis makanan yang akan diberikan berbeda bagi anak yang tinggal di kawasan pesisir dengan pegunungan dan pulau.

Dia mencontohkan salah satu daerah di Maluku Barat Daya, yakni Pulau Moa. Di pulau tersebut masyarakat memproduksi air susu dari kerbau. Karena itu, susu produksi asli Pulau Moa bisa langsung diberikan kepada anak-anak setempat.

Adapun di daerah lain yang bukan tempat produksi susu,

lanjut dia, program makan bergizi gratis akan dilaksanakan dengan membagikan bahan pangan bergizi seperti ikan dan telur. “Kalau lihat protein yang ada di susu ternyata protein dan mineral dan zat-zat yang ada di telur itu lebih baik daripada susu, para pakar cerita kepada saya. Dan telur kita jatuhnya bisa lebih murah karena di suatu daerah susu itu terlalu mahal, ya kita konsentrasi kepada telur, kepada ikan, dan sebagainya,” ujarnya.


Prabowo optimistis pemerintahannya kelak bisa mengeksekusi program tersebut. Pasalnya, dia sudah menghitung kebutuhan anggaran menjalankan program unggulannya itu dan menyimpulkan keuangan negara mampu membiayainya. ■ BSH

|        |                |  |
|--------|----------------|--|
| Title  | PANEN JAGUNG   | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024    |  |
| Media  | Rakyat Merdeka |  |
| Page   | 10             |  |
| Author | Rakyat Merdeka |  |



ANTARA FOTO/Henry Purba/agnym

**PANEN JAGUNG:**  
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kiri) bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kanan) memanen jagung di lahan ketahanan pangan Kostrad, Neglasari, Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (4/6/2024). Mentan dan KSAD memanen jagung di atas lahan seluas sekitar 700 hektare sebagai upaya meningkatkan produksi pertanian untuk mewujudkan program ketahanan pangan di Indonesia.

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | Sumut Ekspor 593,3 Ton Kayu Manis Ke 10 Negara | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                                    |  |
| Media  | Rakyat Merdeka                                 |  |
| Page   | 10   |  |
| Author | Rakyat Merdeka                                 |  |

# Sumut Ekspor 593,3 Ton Kayu Manis Ke 10 Negara

SUMATERA Utara (Sumut) mengekspor kayu manis ke 10 negara. Terdapat 593,3 ton kayu manis senilai Rp 40,73 miliar yang diekspor.

Adapun 10 negara yang mengimpor kayu manis tersebut, antara lain Belanda, Brazil, Amerika Serikat, Malaysia, Thailand, Jerman, Ukraina, Portugal dan India.

Kayu manis tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi permintaan industri farmasi dan makanan.

|        |   |
|--------|---|
| Title  | Baru Lima Bulan, Impor Beras RI Hampir 2 Juta Ton |
| Date   | 5 Juni 2024                                       |
| Media  | Investor Daily                                    |
| Page   | 8   |
| Author | Tri Listiyarini                                   |



Kementerian Pertanian

# Baru Lima Bulan, Impor Beras RI Hampir 2 Juta Ton

**JAKARTA, ID**—Indonesia telah mendatangkan 1,78 juta ton beras impor dari berbagai negara sepanjang 1 Januari-2 Juni tahun ini, atau sekitar 44% dari rencana yang ditetapkan pemerintah dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan-NK) Beras 2024 sebesar 4,04 juta ton. Hampir seluruh beras dari luar negeri tersebut digunakan untuk keperluan umum dalam rangka peningkatan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog. Sementara itu, Indonesia pada 2023 merealisasikan pemasukan beras impor sebanyak 3,06 juta ton.

Oleh Tri Listiyarini

Laporan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) menyebutkan, penetapan impor beras di NK 2024 sebesar 4.045.761 ton. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor (PI) 4.045.761 ton, terealisasi 1.779.257 ton (43,98%) dan belum terealisasi 2.266.504 ton (56,02%). Secara rinci, penetapan impor beras di NK 2024 untuk keperluan umum 3,6 juta ton, PI diterbitkan 3,6 juta ton bagi satu pelaku usaha (importir), yakni Perum Bulog, dan realisasinya per 2 Juni 2024 sekitar 1,7 juta ton. Lalu, penetapan impor beras di NK 2024 untuk beras industri 412 ribu ton dengan PI diterbitkan 412 ribu ton kepada 11 pelaku usaha dan realisasinya 110.100 ton serta untuk beras khusus 33.700 ton dengan PI diterbitkan 33.700 ton kepada tiga pelaku usaha dan realisasinya 14.600 ton.

Dalam laporan itu juga teruat tentang informasi terkini mengenai importasi gula, bawang putih, jagung, dan daging lembu. Untuk gula, penetapan impor di NK 2024 sebesar 5.489.054 ton dengan PI terbit sebanyak 5.134.477 ton (terrealisasi 1.954.209 ton dan belum terealisasi 3.180.268 ton). Pada bawang putih, penetapan impor di NK 2024 sekitar 665.025 ton dengan PI terbit 349.290 ton (terrealisasi 148.712 ton dan belum terealisasi 200.578 ton). Lalu jagung, penetapan impor di NK 2024 sebanyak 1.967.026 ton dengan PI terbit 1.967.026 ton (terrealisasi 782.749 ton dan belum terealisasi 1.184.277 ton). Terakhir daging lembu, penetapan impor di NK 2024 mencapai 270.352 ton dengan PI terbit 219.244 ton (terrealisasi 51.363 ton dan belum terealisasi 167.881 ton).

Paparan laporan Bapanas itu disampaikan Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Selasa (04/06/2024). Sarwo menjelaskan, khusus beras, mayoritas impor berupa penugasan dari pemerintah kepada Bulog untuk tujuan keperluan umum. "Penetapan



impor beras berdasarkan Sinan-NK itu 4.045.761 ton, dengan 3,6 juta ton berupa beras umum dan 400 ribu ton beras khusus/industri," ujar Sarwo. Dari target 4.045.761 ton itu, sudah terbit PI sama besarnya, serta realisasinya baru 1,7 juta ton dan yang belum 2,2 juta ton. "Beras umum itu ditugaskan oleh Bapanas kepada Bulog. Saat ini, bola sudah ada di Bulog, tinggal bagaimana Bulog mengatur impor, melelang atau melakukan pengadaan beras dimaksud. Tugas pemerintah melalui surat penugasan sudah, PI sudah, tinggal Bulog mengeksekusinya," jelas Sarwo.

Menurut Sarwo, beras umum yang diimpor Bulog tersebut digunakan untuk meningkatkan stok CBP di gudang BUMN tersebut. Atas penugasan dari pemerintah, stok CBP disalurkan untuk sejumlah keperluan, di antaranya mengintervensi harga beras di pasaran yang saat ini masih di

atas harga eceran tertinggi (HET). Catatan Bapanas menunjukkan, rerata harga beras premium di zona III pada 2 Juni 2024 sudah lebih tinggi 14,25% dari HET, beras medium di zona III lebih tinggi 14,08% dari HET, beras medium di zona II lebih tinggi 7,96% dari HET, beras premium di zona II lebih tinggi 6,15% dari HET, dan beras medium di zona I lebih tinggi 4,3% dari HET. "Untuk harga beras medium di zona I statusnya waspada. Sedangkan harga beras premium di zona III, beras medium di zona II, dan beras premium di zona II itu statusnya perlu segera diintervensi agar normal lagi. Kami akan perintahkan Bulog segera menyalurkan beras SPHP di zona III dan II agar harganya segera turun," papar Sarwo.


Pergerakan harga itu mengacu Surat Kepala Bapanas No 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024 yang memperpan-

jang relaksasi HET beras medium dan premium hingga terbitnya revisi Peraturan Bapanas No 7 Tahun 2023 tentang HET Beras. Rinciannya, HET beras medium dan premium di zona I (Jawa, Lampung, Sumsel, NTB, Sulawesi) masing-masing Rp 12.500 per kilogram (kg) dan Rp 14.900 per kg, zona II (Sumut, Sumbang, NTT, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan) masing-masing Rp 13.100 per kg dan Rp 15.400 per kg, dan zona III (Maluku dan Papua) masing-masing Rp 13.500 per kg dan Rp 15.800 per kg.

## Stok Melimpah

Sementara itu, stok beras yang dikuasai Perum Bulog saat ini relatif melimpah berkat pengadaan domestik yang masif di panen raya ini dan pemasukan impor. Total stok beras Perum Bulog per 2 Juni 2024 mencapai 1.813.082 ton, terdiri atas CBP 1.810.442 ton dan komersial 51.607 ton. Kadiv Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Epi Sulandari menuturkan, stok tersebut tersebar di seluruh Kanwil Bulog di seluruh Indonesia dengan tujuan memudahkan proses distribusi, baik untuk operasi pasar (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/SPHP) maupun bantuan pangan beras (BPPB). "Stok terbesar di antaranya di Jatim 301.554 ton, Jabar 235.874 ton, DKI Jakarta-Banten 191.962 ton, Jateng 167.048 ton, Sulsel-Sulbar 164.162 ton, Lampung 86.987 ton, Sumut 85.072 ton, dan Sumsel-Babel 71.446 ton," jelas Epi.

Stok CBP digunakan Bulog untuk kegiatan SPHP dan BPPB. Khusus realisasi penyaluran beras SPHP per 1 Juni 2024 mencapai 740.109 ton atau 62% dari target penugasan sepanjang 2024 sebesar 1,2 juta ton. Proporsi realisasi distribusi beras SPHP paling besar ke pengecer 57,4%, diikuti distributor 36,7%, Satgas 4,2%, pemerintah daerah (pemda) 1,5%, dan sinergi BUMN 0,3%. Sementara itu, realisasi penyaluran untuk pasar retail modern 32.272 ton dan distributor 162.019 ton. "Penyaluran beras SPHP terus menurun dalam waktu tiga bulan terakhir. Hal ini karena sudah masuknya musim panen raya sehingga permintaan beras SPHP turun," tutur Epi Sulandari.

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | Stabilitas Inflasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                                  |  |
| Media  | Investor Daily                               |  |
| Page   | 7  |  |
| Author | Ark  |  |

## Stabilitas Inflasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

**JAKARTA, ID** – Pemerintah konsisten menjaga inflasi pada level 1,5%-3,5%, karena inflasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga tren pertumbuhan sesuai target yang ditetapkan. Inflasi akan dijaga sesuai target di tengah level inflasi global yang belum kembali ke periode prapandemi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, inflasi akan terus dikendalikan melalui kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga biaya bagi ekonomi pada level yang wajar. "Termasuk ke depan, risiko *imported inflation* akan terus diantisipasi melalui koordinasi pemerintah dan bank sentral mengingat geopolitik global masih sangat dinamis," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR pada Selasa (4/6/2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Mei 2024 tercatat 2,84% secara *year on year* (yoy), melandai dari inflasi April 2024 yang sebesar 3,0% (yoy). Secara bulanan, pada Mei 2024 tercatat deflasi 0,03% secara *month to month* (mtm) dan inflasi tahun kalender sebesar 1,16%. "Kesejahteraan masyarakat tersebut juga ditopang oleh level inflasi yang terjaga, sehingga daya beli masyarakat tidak mengalami distorsi," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Kepala Badan

Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pemerintah akan terus mewaspadai perkembangan harga pangan guna menjaga akses pangan pokok masyarakat. Meskipun harga sudah mulai melandai, pemerintah terus konsisten dalam mengantisipasi risiko gejolak harga ke depan, terutama karena tantangan cuaca ekstrem.

"Berbagai kebijakan terus dilaksanakan, antara lain intervensi harga, stabilisasi pasokan, dan meningkatkan kelancaran distribusi guna mendukung pencapaian target inflasi *volatile food* di bawah 5% serta terkendalinya inflasi hingga di tingkat daerah," kata Febrio.

Di sisi lain, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan bahwa inflasi yang terjadi pada Mei 2024 merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter. Selain itu, eranya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. "Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5-1% pada 2024 dan 2025," tutur Erwin.



### Prediksi Total Produksi Jagung

Pekerja memilah jagung di gudang jagung Kostrad, Neglasari, Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (4/6/2024). Badan Pusat Statistik memprediksi total produksi jagung pipilan kering (UPK) kadar air (KA) 14 % pada Mei 2024 mencapai 0,63 juta ton dan pada Juni 2024 mencapai 0,66 juta ton.

### Waspada Faktor Geopolitik

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kaldani mengatakan, pihaknya berharap agar pemerintah terus mewaspadai resiko peningkatan

inflasi. Ini khususnya inflasi minyak dan gas/bahan bakar minyak yang bisa terapresiasi sewaktu karena faktor geopolitik, dan inflasi yang disebabkan oleh depresiasi nilai tukar terhadap barang impor (*imported inflation*).


"*Imported inflation* masih akan terus menjadi *down side risk* terhadap pengendalian inflasi Indonesia sepanjang tahun, karena ini sangat tergantung pada peningkatan tekanan ekonomi eksternal dan kemampuan pemerintah

dalam menciptakan penguatan nilai tukar yang signifikan," ucap Shinta.

Apalagi, jelas dia, saat ini nilai tukar rupiah sudah di level Rp 16 ribu per dolar AS, dan dalam 2-3 minggu terakhir justru sedang dalam tren depresiasi nilai tukar. Oleh karena itu, pemerintah dapat menciptakan intervensi-intervensi yang dibutuhkan untuk menstabilkan dan menciptakan penguatan nilai tukar. "Khususnya dengan peningkatan linerja ekspor dan penerimaan FDI," imbuh Shinta.

Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo juga mengatakan bahwa untuk inflasi tahunan pada Juni 2024 diperkirakan akan mencapai 2,93%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh inflasi inti sejalan dengan efek libur sekolah tengah tahun, masih tingginya harga emas, dan Iduladha. Walaupun meningkat, inflasi *volatile food* diperkirakan tetap terkendali meski berpotensi sedikit meningkat di akhir musim panen, sementara *administered price* diperkirakan relatif stabil.

"Hingga akhir tahun, inflasi diperkirakan terjaga di kisaran tengah target, sebesar 2,5% dengan beberapa risiko, seperti *imported inflation* seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang perlu diwaspadai," tutur Banjaran. (ark)


|        |                                |  |
|--------|--------------------------------|--|
| Title  | Harga Kopi Gunung Puntang Naik | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                    |  |
| Media  | Koran Kontan                   |  |
| Page   | 13                             |  |
| Author | Koran Kontan/Raisan Al Farisi  |  |

## Harga Kopi Gunung Puntang Naik



ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

**Buruh** tani menjemur biji kopi puntang di Kaki Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/6). Petani kopi di Gunung Puntang menyebutkan, harga biji kopi di Gunung Puntang naik menjadi Rp 100.000 per kilogram (kg) atau naik sebesar 30% dibandingkan Juni tahun lalu yang hanya Rp 80.000 per kg. Kenaikan harga ini dipicu meningkatnya permintaan dari berbagai kota di Indonesia.

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Title  | Lima RPB Garam di Sulsel Naikkan Produksi 15 Ton per Hari |  |
| Date   | 5 Juni 2024   |   |
| Media  | Media Indonesia   |   |
| Page   | 11  |   |
| Author | LN/E-2  |   |

## Lima RPB Garam di Sulsel Naikkan Produksi 15 Ton per Hari


RUMAH Produksi Bersama (RPB) Garam yang berada di Kabupaten Jeneponto dan Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, diharapkan dapat menaikkan produksi hingga 15 ton per hari.

RPB Garam di Pangkep yang dalam waktu dekat akan diresmikan Presiden Joko Widodo mampu meningkatkan produksi garam rumah tangga dan industri, dari 2 ton per hari menjadi 17 ton dengan kapasitas maksimal 30 ton per hari.

“Pengerjaan RPB Garam di Kabupaten Pangkep selesai tepat waktu dan telah beroperasi. Sementara revitalisasi akan dilakukan di Pasar Rakyat Beroanging di Kabupaten Jeneponto yang melayani delapan desa di sekitarnya,” sebut Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh, kemarin.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel Ashari Fakhshirie Radjamilo menambahkan, RPB Garam di Sulsel adalah bagian dari 11 RPB yang ada di Indonesia.

Di Sulsel terdapat lima daerah yang ditetapkan sebagai kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (Segar) yaitu Kabupaten Jeneponto, Takalar, Maros, Pangkep, dan Kepulauan Selayar. Secara keseluruhan jumlah luas lahan usaha tambak garam di wilayah tersebut sekitar 1.657,27 hektare. (LN/E-2)

|        |                                  |  |
|--------|----------------------------------|--|
| Title  | Stok Beras bakal kembali Defisit | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                      |  |
| Media  | Media Indonesia                  |  |
| Page   | 2                                |  |
| Author | Naufal Zuhdi                     |  |

# Stok Beras bakal kembali Defisit

Daerah-daerah mengeluhkan kekurangan pompa air, bahkan petani di Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, sama sekali belum mendapat bantuan.

NAUFAL ZUHDI  
naufal@mediaindonesia.com

**K**EKERINGAN yang mulai melanda Tanah Air bakal mengganggu pasokan gabah dan produksi beras secara nasional. Impor beras sangat mungkin tidak terhindarkan. Di sisi lain, belum ada kejelasan langkah konkret yang dipayakan pemerintah.

Pengamat pertanian, Syaiful Bahari, mengingatkan produksi beras yang kian kedodoran sampai saat ini belum pulih. Ditambah dengan dampak kekeringan yang berlanjut, ketersediaan beras akan makin defisit.

"Untuk meningkatkan produksi butuh waktu. Namun, persoalannya, bagaimana kemampuan keuangan pemerintah untuk impor beras, atau jalan apa yang harus ditempuh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beras nasional, masih belum ada suara dari pemerintah," tutur Syaiful kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Gangguan ketersediaan pangan makin meningkatkan an-

## Daerah Mengalami Kekeringan di Jawa Tengah

- Cilacap
- Kebumen
- Purworejo
- Blora
- Demak
- Grobogan
- Rembang
- Kendal
- Klaten
- Sukoharjo
- Wonogiri

Dua kabupaten berstatus siaga:

- Jepara
- Pati



### Kondisi Kemarau di Indonesia

- 19% dari zona musim sudah masuk musim kemarau.
- Sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan memasuki musim kemarau pada tiga dasarian ke depan.
- Kondisi kekeringan ini, saat musim kemarau, akan mendominasi wilayah Indonesia sampai akhir September 2024.

### Mitigasi Pemerintah Hadapi Kekeringan

- Mengantisipasi datangnya musim kemarau dengan menyiapkan cadangan pangan pemerintah (CPP).
- Stok CPP saat ini mencapai 1,8 juta ton dan dimiliki oleh Perum Bulog.
- Menyiapkan bantuan air bersih.
- Memberikan bantuan pompa-pompa air ke daerah-daerah.
- Mengatur penyaluran air dengan tangki-tangki ke daerah rawan kekeringan.

Sumber: BMKG/BPBD/Bapanas/Litbang MI

caman tekanan inflasi. Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, mengatakan inflasi *volatile food* masih relatif tinggi, yakni per Mei 2024 di angka 8,14% secara *year on year*.

Apabila periode kemarau tidak diantisipasi dengan baik dan pendistribusian juga kurang baik, harga pangan akan kian terkerek.

"Tentu ini akan sangat membebani masyarakat, terutama kalangan menengah dan miskin, mengingat porsi mereka untuk membeli bahan pangan itu lebih separuh dari total pengeluaran," ungkap Eliza.

Ia mendesak pemerintah

lebih serius mengantisipasi. Untuk jangka pendek, petani perlu bantuan berupa BBM bersubsidi untuk menghidupkan pompa-pompa air. Sebagai antisipasi jangka menengah dan panjang, dibutuhkan pembuatan embung-embung dan perbaikan sistem irigasi.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut pemerintah bersiap menghadapi kemarau. "Kita siapkan CPP (cadangan pangan pemerintah) untuk antisipasi," ujar Arief.

Saat ini stok CPP beras sebanyak 1,8 juta ton yang dimiliki Perum Bulog dan tersebar di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia.

### Kekurangan pompa

Di Jawa Tengah, kekeringan telah mencapai 11 daerah (lihat tabel). Lahan sawah yang gagal panen makin meluas. Hingga awal Juni, jumlah lahan puso tersebut telah mencapai 137,2 hektare.

"Kekeringan paling parah di pantura timur seperti Blora, Pati, dan Rembang, serta sebagian Solo Raya seperti Klaten, Wonogiri, dan Sragen," kata Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Francisca Herawati.

Ia mengatakan bantuan pompa air hingga mencapai 10 ribu unit dari Kementerian Pertanian (Kementan) telah disalurkan ke 35 kabupaten/kota untuk menyediakan air bagi persawahan.


Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten juga menyiapkan anggaran Rp180 juta untuk penyaluran hingga 500 tangki air. Namun, jumlah itu masih lebih kecil daripada realisasi penyaluran di 2023 yang mencapai 964 tangki.

Di Kabupaten Subang, Jawa Barat, sedikitnya 2.000 hektare sawah belum bisa ditanami padi karena tidak ada jaminan pasokan air. Dinas pertanian setempat telah mengajukan permintaan bantuan 200 pompa air, tetapi baru terealisasi 95 unit.

Masih di Jawa Barat, kondisi kekeringan di Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, lebih mengengaskan lagi karena petani di sana sama sekali belum mendapatkan bantuan pompa air. (AS/RZ/JS/UL/AD/RX/F-10)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | Petani "Champion" Diminta Jadi Investor di Daerah Defisit Pangan | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024  |  |
| Media  | Kompas   |  |
| Page   | 9  |  |
| Author | HEN  |  |

## KEBIJAKAN PANGAN

# Petani "Champion" Diminta Jadi Investor di Daerah Defisit Pangan

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pertanian meminta petani *champion* atau unggulan bawang merah dan cabai menjadi investor di daerah yang kerap mengalami defisit stok kedua komoditas tersebut. Hal itu guna mengatasi problem tahunan kenaikan harga kedua komoditas yang rutin menyumbang inflasi.

Direktur Perbenihan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Inti Pertiwi Nashwari, Selasa (4/6/2024), mengatakan, Kementan telah menggelar rapat koordinasi dengan para petani *champion* bawang merah pada 30 Mei 2024. Dalam rapat itu, mereka bersedia berinvestasi membudidayakan bawang merah di daerah-daerah yang kerap meng-

alami defisit stok komoditas tersebut.

Mereka siap mengelola lahan milik pemerintah daerah atau menyewa lahan di daerah tersebut untuk membudidayakan dan menjadi *offtaker* bawang merah. Namun, status hukum lahan itu harus jelas serta memenuhi persyaratan teknis dan geografis untuk budidaya bawang merah.

Kementan dan para *champion*, lanjut Inti, telah menyiapkan persyaratan penggunaan dan karakteristik lahan beserta varietas bawang merah yang sesuai dengan karakter lahan tersebut. Ada varietas bawang merah yang adaptif di dataran rendah-menengah, yakni bima brebes, super philips, dan biru lancor. Ada juga varietas yang adaptif di dataran mene-

ngah-tinggi, seperti tajuk, batu ijo, dan SS sekato.

Selain itu, petani *champion* bawang merah juga siap mentransfer teknologi budidaya bawang merah. Mereka bahkan berkomitmen menjadi pemasok bawang merah melalui skema kerja sama antar-daerah.

"Pemerintah daerah bisa menyiapkan mitra dagang sekaligus *coldstorage* (gudang penyimpanan berpendingin)," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta.

Menurut Inti, hal itu merupakan solusi permanen untuk mengatasi defisit stok dan ke-

naikan harga bawang merah yang kerap terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Hal itu juga menjadi peluang membangun sentra-sentra baru bawang merah agar tidak terpusat di Jawa.

"Untuk itu, kami berharap pemerintah daerah perlu segera menindaklanjutinya. Nanti kami akan turut bertanggung jawab juga terhadap kinerja para petani *champion* itu," ucapnya.

### Realisasi impor pangan

Dalam forum yang sama, Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta importir sejumlah pangan pokok segera merealisasikan impor komoditas-komoditas itu. Impor tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas stok dan harga sejumlah pangan pokok.


Komoditas-komoditas itu, antara lain, gula, jagung, bawang putih, beras, dan daging lembu. Hingga awal Juni 2024, rata-rata realisasi impor komoditas-komoditas tersebut masih rendah atau masih di bawah 50 persen dari kuota impor yang telah disetujui pemerintah.

Sekretaris Bapanas Sarwo Edhy mencontohkan, kuota impor gula mentah dan konsumsi pada 2024 sebesar 5,49 juta ton. Namun, realisasinya baru 1,95 juta ton atau 38,1 persen dari total kuota impor.

Begitu juga dengan beras. Kuota impor beras pada 2024 sebesar 4,04 juta ton. "Total realisasi impor beras baru 1,78 juta ton atau 44 persen dari total kuota impor. Padahal, semua persetujuan impor telah diterbitkan," katanya. (HEN)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Title  | Program Makanan Bergizi Gratis Instrumen Untuk Indonesia Maju |  |
| Date   | 5 Juni 2024   |   |
| Media  | Investor Daily  |   |
| Page   | 1 Part 1  |   |
| Author | Arnoldus Kristianus   |   |

# Program Makanan Bergizi Gratis Instrumen untuk Indonesia Maju

Oleh **Arnoldus Kristianus**

**JAKARTA, ID** - Guna menjadi negara maju maka pemerintah harus mencapai pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 6-8%. Rentang pertumbuhan ekonomi tersebut baru bisa dicapai bila ditopang dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Salah satu langkah yang dilakukan dalam pengembangan SDM adalah melalui program makan bergizi gratis.

“Program perbaikan sumber daya manusia termasuk melalui program makanan bergizi, perbaikan reformasi kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, serta penyempurnaan jaring pengaman sosial menjadi sangat

penting dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia Indonesia,” ucap Sri Mulyani dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (04/06/2024).

Langkah mencapai pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6-8% dijalankan agar Indonesia naik kelas menjadi negara maju di tahun 2045. Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut harus diiringi dengan perbaikan kualitas dan inklusivitas.


“Untuk mencapai pertumbuhan tinggi kontribusi dari produktivitas harus dan wajib ditingkatkan hal ini bisa diperoleh melalui investasi sumber daya manusia dan transformasi ekonomi agar menciptakan nilai tambah yang semakin tinggi di

dalam perekonomian nasional,” tutur Sri Mulyani.

Dia mengatakan pemerintah harus belajar dari negara-negara yang berhasil menjadi negara maju dan bisa menghindari dari perangkap jebakan kelas menengah (*middle income trap*) seperti Korea Selatan yang konsisten dengan pertumbuhan ekonomi di atas 10%.

“Hal ini menunjukkan selain kualitas dan produktivitas dari sumber daya manusia maka perbaikan iklim investasi untuk meningkatkan peranan investasi dan pertumbuhan sektor manufaktur menjadi sangat kunci bagi perjalanan menuju Indonesia Emas,” terang Sri Mulyani.

>> **KE HAL 15**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Program Makanan Bergizi Gratis Instrumen Untuk Indonesia Maju | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024   |  |
| Media  | Investor Daily  |  |
| Page   | 1 Part 2  |  |
| Author | Arnoldus Kristianus   |  |

## Program Makanan Bergizi Gratis Instrumen untuk Indonesia Maju

### > Sambungan dari hal 1

Dalam rancangan APBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan dalam kisaran Rp 741,7 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing ditempuh melalui beberapa program unggulan, antara lain peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan Perguruan Tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.

Sedangkan alokasi perlindungan sosial di kisaran Rp 496,9 triliun dalam rancangan APBN 2025. Anggaran ini akan digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar

daerah. Bila dirinci, pemerintah menjalankan sejumlah program dalam perlindungan sosial yaitu penguatan perlindungan sosial pemberdayaan dan penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat untuk mempercepat gradasi pengentasan kemiskinan; peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau; hingga mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.

Sementara itu, anggaran kesehatan di tahun 2025 di kisaran Rp 191,5 triliun hingga Rp 217,8 triliun. Untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas dilakukan dengan mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga dapat meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan perlindungan finansial bagi masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pihaknya sedang menyusun rancangan teknokratik untuk implementasi program makan bergizi gratis. Dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas sedang melakukan pendetailan mulai dari penerima program makan bergizi gratis, frekuensi, hingga rasio gizi.

"Siapa target grupnya, kemudian bagaimana frekuensinya, seminggu tiga kali kah seminggu dua kali kah? Hal itu penting sekali, karena itu akan menentukan jumlah (anggaran)," terang Suharso.

Dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah ingin melibatkan pelaku usaha di daerah tersebut. Nantinya akan ada partisipasi dari pengusaha lokal dalam pengadaan hingga pembagian program makan bergizi gratis.

"Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya mengadakan

itu? Nah kalau kami berpikirnya ya kalau itu di daerah A, carilah di daerah A. Supaya di daerah A itu ekonominya juga berjalan. Jadi kalau mereka perlu telur, ambil telurnya dari A, jangan telurnya diambil dari B," tutur Suharso.

Dalam penyusunan anggaran pemerintah akan melakukan kajian terkait anggaran hal-hal yang menjadi prioritas. Khususnya kebijakan yang memiliki dampak signifikan. Khususnya, dalam meningkatkan kualitas gizi dari masyarakat. Namun pihaknya tidak merinci seberapa besar alokasi anggaran yang sudah akan digunakan.

"Politik anggaran itu adalah soal memilih. Jadi nanti kita lihat saja mana yang akan menjadi prioritas. Mana yang punya dampak signifikan terhadap sasaran yang sudah kita sepakati," pungkas Suharso.

### Uji Coba

Sementara itu, Wali Kota Surakarta sekaligus Wakil Presi-

den terpilih Gibran Rakabuming Raka menyambut baik uji coba makan siang dan pemberian susu gratis oleh sejumlah pihak. "Saya kira cukup baik, untuk mencoba skema-skema yang berbeda," katanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (04/06/2024).

Selanjutnya, kata dia, untuk skema yang terbaik dapat dieksekusi secara nasional. Meski demikian ia memastikan sejauh ini program tersebut belum berjalan. Sementara itu mengenai perlunya penambahan populasi hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan susu bagi para siswa, menurut dia, perlu dilakukan.

Meski demikian sejauh ini pihaknya belum melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan). "Saya belum koordinasi dengan Kementan ya, nanti ya saya coba koordinasi," kata Gibran.

Namun ia menegaskan perlunya memperbanyak populasi hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan susu, telur, dan

daging.

Sebelumnya Kementan dan Universitas Gajah Mada (UGM) membangun kolaborasi untuk memperkuat industri persusuan nasional sebagai upaya meningkatkan produksi susu dalam negeri.


"Kami tidak hanya fokus pada swasembada daging, tapi juga swasembada protein hewani, termasuk ternak perah yang menghasilkan susu," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Ia menekankan pentingnya meningkatkan konsumsi susu di Indonesia sebagai langkah strategis untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

"Mengonsumsi susu secara rutin bisa meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045," ujar Nasrullah. (b1)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMENTAN

|        |                                 |  |
|--------|---------------------------------|--|
| Title  | Pemda Identifikasi Potensi Puso | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                     |  |
| Media  | Media Indonesia                 |  |
| Page   | 9                               |  |
| Author | Rahmat Rullah                   |  |

*Di Tasikmalaya, kemarau sudah melanda sejumlah daerah dan membuat puluhan hektare sawah kekeringan. Sebagai upaya mengantisipasi kerugian akibat puso, para petani diminta mengikuti program asuransi usaha tani padi.*

# Pemda Identifikasi Potensi Puso

**RAHMAT RULLAH**  
rahmat@mediaindonesia.com

Pemerintah daerah mulai melakukan langkah-langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang dikhawatirkan membawa dampak buruk pada sektor pertanian. Di Sulawesi Tenggara (Sultra), dinas pertanian dan peternakan setempat sudah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami gagal panen alias puso akibat kekeringan.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sultra Laode Muh Rusdin Jaya mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Reviyanto, pekan lalu.

"Pak Pj Gubernur mengarahkan kita untuk segera memetakan dae-

rah-daerah yang berpotensi mengalami puso. Pemetaan bisa dilakukan dengan membaca data pada tahun lalu," ujar Rusdin, kemarin.

Setelah pemetaan dilakukan, data yang terkumpul akan diserahkan kepada Kementerian Pertanian sebagai pengajuan pengadaaan pompa air untuk irigasi. Sementara itu, pemerintah daerah akan berperan membuat sumur bor di daerah-daerah yang terdampak kekeringan cukup parah.

"Kami juga akan berikan bibit padi gaga yang memiliki daya tahan tinggi terhadap kondisi kering," imbuhnya.

Adapun daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan ialah Bombana dan Konawe Selatan. Pada tahun lalu, Rusdin mengatakan ada satu hamparan di Lantari Jaya, Bombana, yang terdampak.

"Setelah kejadian itu, kami langsung buat sumur bor kurang lebih 20 titik. Tahun ini, berdasarkan pengalaman tahun lalu, kita sudah buat petanya dan lakukan pendekatan serupa. Yang berbeda, tahun ini kita sertakan bantuan pompa dari pemerintah pusat," tandasnya.

## Ikut asuransi tani

Di Tasikmalaya, kemarau sudah melanda sejumlah daerah dan membuat puluhan hektare sawah kekeringan. Sebagai upaya mengantisipasi kerugian akibat puso, para petani diminta mengikuti program asuransi usaha tani padi (AUTP). Dengan mengikuti program tersebut, petani akan memiliki jaminan perlindungan jika padi yang ditanam tidak berbuah.

"Musim kemarau mulai terjadi dan sekarang memang akan lebih

banyak lahan mengalami kekeringan. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan, termasuk mengikuti program AUTP," ucap Ketua DPW Gerakan Petani Mandiri Indonesia Wilayah Jawa Barat Yuyun Suyud.

Ia mengatakan sejauh ini baru ada sekitar 10% dari total luas lahan pertanian di Tasikmalaya yang sudah mengikuti program penjaminan tersebut. Yuyun memastikan akan terus menyosialisasikan program asuransi kepada para petani untuk memberikan pemahaman secara penuh.


"Soal potensi kekeringan pada kemarau ini, dinas pertanian sudah memberi imbauan melalui camat, kepala desa, dan penyuluh agar para petani dapat menghemat penggunaan air. Namun, secara individu, para petani juga perlu menjaga diri sendiri melalui

program asuransi," tuturnya.

Sementara itu, salah satu warga pemilik lahan pertanian di Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Ubad Subradio, mengatakan sebelum kemarau tiba, para petani setempat sudah mengalami masalah. Pada musim panen lalu, sebagian besar tanaman gagal panen karena diserang hama wereng cokelat. Kondisi kemarau yang sudah di depan mata pun akan menjadi persoalan lanjutan yang sangat menyulitkan.

Berkaca dari hal itu, ia yang sebelumnya tidak mendaftar AUTP tergerak untuk ikut serta dalam program tersebut.

"Tahun lalu petugas penyuluh pertanian lapangan dan pengendali organisme pengganggu tumbuhan memang belum pernah datang untuk memberikan pemahaman," tandasnya. (AD/Z-11)

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | BSIP dan Pemkot Bogor Fasilitas Peternak Jual Hewan Kurban di BHQ | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024   |  |
| Media  | Inilah Bogor  |  |
| Page   | 9   |  |
| Author | Ghi   |  |

## BSIP dan Pemkot Bogor Fasilitas Peternak Jual Hewan Kurban di BHQ

INILAH.Bogor- Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memfasilitasi peternak untuk menjual hewan kurban di Bursa Hewan Qurban (BHQ) yang diselenggarakan di Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSTPKH) Kota Bogor.

Kepala BSIP Fadry Djufry mengatakan, BHQ digelar dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat mendapat tempat penjualan hewan yang layak. Sedangkan para peternak juga didampingi oleh dokter hewan dan paramedik yang memantau terus kondisi kesehatan hewannya.

"Kami siapkan satu tempat di mana ada peternak, dokter hewan dan pembeli ada di situ. Kami menjamin bahwa pemerintah hadir menyediakan hewan kurban yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)," jelasnya.

Fadry menyebutkan kegiatan BHQ ini telah dilaksanakan 22 kali. Dalam kesempatan ini, Fadry dan jajarannya menyematkan kalung tanda sehat ke beberapa ekor hewan kurban yang dipamerkan.

Menurutnya, kolaborasi antara Pemkot Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), hingga IPB University merupakan kolaborasi



yang apik. "Mudah-mudahan semua ternak yang keluar dari sini tersertifikasi bebas dari penyakit sebelum dikurbankan," ujarnya.

Dia menyebutkan di BHQ ada sembilan peternak yang berjualan hewan kurban, dengan rincian sapi yang tersedia sementara ada 76 ekor

ditambah dengan 250 ekor kambing atau domba.

"Hewan ternak yang sehat diberi kalung penanda dan Surat Keterangan Kesehatan

Hewan (SKKH) sebagai bukti hewan dalam kondisi sehat dan terbebas dari penyakit sehingga masyarakat tenang dan aman," ucapnya.

Sebelum masuk BHQ, Agus mengatakan hewan-hewan ternak yang dijual diperiksa oleh dokter hewan yang ada di DKPP Kota Bogor, Sekolah Vokasi Paramedik Veteriner, maupun Fakultas Kedokteran Hewan IPB.


Program ini, kata dia, juga dilakukan untuk memfasilitasi para peternak sehingga mendapat tempat yang layak dalam menjajakan dagangannya.

"BHQ diinisiasi dari banyaknya penyakit yang berpotensi ditimbulkan hewan

ternak. Sebab kalau tidak dikendalikan dapat mengganggu kesehatan manusia. Terlebih Bogor menjadi wilayah endemik antraks. Sebelum itu terjadi perlu ada pemeriksaan dan pengawasan agar warga dapat terlindungi," jelasnya.

Kepala DKPP Kota Bogor Chusnul Rozaqi menyampaikan BHQ hadir sebagai bentuk komitmen pihaknya menyediakan kebutuhan dan menjamin keamanan pangan.

Ia menjelaskan pada momen Idul Adha 1445 H kebutuhan hewan kurban di Kota Bogor bisa mencapai lebih dari 20.000 ekor. Terdiri atas 14.000 ekor kambing atau domba dan 4.000 ekor sapi. (Ghi)

|        |                           |  |
|--------|---------------------------|--|
| Title  | Daya Beli Petani Tertekan | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024               |  |
| Media  | Inilah Bogor              |  |
| Page   | 3                         |  |
| Author | Sae/dir                   |  |

## Daya Beli Petani Tertekan

**MAKASSAR, FAJAR** — Meski harga beras mahal, daya beli petani masih tertekan. Hal itu terlihat dari nilai tukar petani (NTP) yang menurun.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Aryanto, menurukan NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani merupakan salah satu proxy indikator melihat tingkat daya beli.

NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

"Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani," ucapnya, kemarin.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pihaknya mencatat NTP Gabungan Sulsel pada Mei sebesar 115,53. Capaian terakhir mengalami penurunan 1,08 persen dibandingkan dengan NTP April sebesar 116,80.

"Adapaun rinciannya yakni NTP Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) tercatat sebesar 100,66, Subsektor Tanaman Hortikultura (NTPH) sebesar 138,51, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 159,60, Subsektor Peternakan (NTPPT) sebesar 111,65, dan Subsektor Perikanan (NTNP) sebesar 109,60," ujarnya.

Kata dia, pada Mei empat dari lima subsektor pertanian mengalami penurunan NTP dibanding bulan sebelumnya.


"Subsektor yang dimaksud yaitu Subsektor Tanaman Pangan sebesar 3,20 persen, Subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 3,00 persen, Subsektor Peternakan sebesar 0,65 persen, dan Subsektor Perikanan sebesar 0,58 persen," rincinya.

Ia menjelaskan bahwa subsektor tanaman perkebunan rakyat menjadi satu-satunya yang mengalami peningkatan NTP sebesar 3,51 persen. "Untuk nilai tukar usaha pertanian (NTUP) Mei sebesar 118,96, capaian itu juga turun 1,30 persen dibandingkan bulan sebelumnya," katanya.

Bendahara Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Andi Iwan Darmawan Aras, menurukan pada prinsipnya setiap kenaikan harga kebutuhan penyelenggaraan pertanian itu akan menaikkan biaya produksi di tingkat petani. Mulai dari pengangkutan bahan dan alat pertanian.

"Misalnya pupuk, bibit jadi distributor di tingkat petani itu akan menaikkan lagi ongkos produksi pascapanen juga pasti akan naik, mulai dari tempat panen ke penjualan akhir," ucapnya.

Lebih lanjut Plt Ketua HKTI Sulsel itu juga mengatakan dengan terjadinya kenaikan tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah menjaga harga di tingkat petani agar tetap stabil. "Harga boleh naik tetapi masih mampu di beli oleh masyarakat jangan sampai harga naik tapi nilai tukar petani semakin turun," katanya. (sae/dir)

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Harga bawang dan cabai naik jadi pemicu inflasi | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                                     |  |
| Media  | Radar Lombok                                    |  |
| Page   | 5   |  |
| Author | Rat   |  |

# Harga Bawang dan Cabai Naik Jadi Pemicu Inflasi

**MATARAM**—Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan kenaikan harga bawang merah menjadi penyumbang dalam inflasi tahunan Mei 2024. Berdasarkan hasil pemantauan kabupaten/kota oleh Badan Pusat Statistika NTB, pada Mei 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,77 persen. Dimana kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang terbesar.

"Ternyata yang mempengaruhi inflasi kita, walaupun angka inflasi kita bagus, yaitu masih adanya kenaikan (harga, red) gula pasir, bawang merah dan cabai," kata Nelly, Selasa (4/6).

Nelly mengklaim kenaikan harga beras tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi NTB. Justru inflasi lebih banyak didongkrak karena kenaikan harga bawang merah dan cabai. Dari pantauan Disdag, harga bawang merah saat ini berkisar diangka Rp 36.650 ribu per kilogram. Sedangkan cabai rawit dibandrol seharga Rp 41.783 ribu per kilogram.

Maka untuk mengatasi persoalan ini, Pemprov sudah menggelar rapat koordinasi



**PASAR TRADISIONAL:** Komoditi bawang merah dan cabai rawit disebut sebagai penyumbang inflasi daerah. Tampak pedagang bawang dan cabai di pasar tradisional.

cabai rawit dan sebagainya," katanya. Namun karena luas lahan tanam milik Pemda cukup banyak, maka oleh Pemprov tidak serta merta semua lahan di NTB akan ditanam komoditi bawang atau cabai. Karena dikhawatirkan ketika produksi dua komoditi ini justru membuat harga ditingkat petani malah anjlok.

"Harga cabai sama bawang standar, artinya masih dititik imbang. Makanya inflasi kita bagus. Konsumen ok petani juga ok. Kondisi ini yang kita harapkan bertahan stabil," tambahnya.

Sementara untuk saat ini Disdag masih memantau harga sejumlah komoditi bahan pokok di pasaran menjelang perayaan Idul Adha. Hasilnya rata-rata harga bakop masih stabil sehingga Pemprov pun belum ada melakukan intervensi apapun.

Beda halnya ketika perayaan hari Raya Idul Fitri dan Maulid Nabi Muhammad yang dimana tingkat pembelian masyarakat terhadap bakop sangat tinggi disatu bulan menjelang acara.

Hal itulah yang membuat harga bakop dipasaran bergejolak. Sedangkan pada perayaan Idul Adha animo masyarakat untuk belanja jauh lebih sedikit.

Disisi lain, deflasi ini malah mempengaruhi pergerakan ekonomi NTB yang lambat. Karena hal itu menandakan bahwa masyarakat yang membelanjakan uangnya menjadi lebih sedikit. Ditambah ada kebinakan Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan SPHP beras.

"Sampai hari H-3 kita lihat kalau memang ada kenaikan yang kira-kira merekah kita mengambil langkah," ujarnya.

Kepala BPS NTB Wahyudin Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,08 persen.

Adapun komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi m-to-m pada Mei 2024, antara lain bawang merah, daun bawang, sewa rumah, angkutan udara, sigaret kretek mesin (Skm), sigaret putih mesin (Spm), hingga sepeda motor. "Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, yakni tomat, beras, ikan layang atau ikan benggol, cumi-cumi, udang basah," tutupnya. **(rat)**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

|        |                                       |  |
|--------|---------------------------------------|--|
| Title  | Jumlah Hewan Kurban di Jabar Naik 15  | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                           |  |
| Media  | Pikiran Rakyat                        |  |
| Page   | 7                                     |  |
| Author | Kismi Dwi Astuti, Novianti Nurullilah |  |



DENI ARMANSYAH/KONTRIBUTOR "PR"

*PEDAGANG memberi pakan hewan kurban di tempat penjualan hewan kurban, Jalan Kopo Cirangrang, Kota Bandung, Senin (3/6/2024).\**

## Jumlah Hewan Kurban di Jabar Naik 15%

### BOGOR, (PR).-

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat menyebutkan jumlah hewan kurban di wilayahnya pada tahun 2024 diperkirakan meningkat 15% dibanding tahun 2023.

Kepala DKPP Jawa Barat Arifin Soedjayana menyebutkan, pada 2023 jumlah hewan kurban yang dipotong sebanyak 316.265 ekor, dengan rincian 97.237 sapi, 803 kerbau, 172.440 domba, dan 45.785 kambing

"Pada tahun ini diperkirakan ada kenaikan 15% untuk semua hewan kurban. Mudah-mudahan terealisasi karena hasil monitoring kami ke lapangan permintaan hewan kurban masih terus terjadi," katanya seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Selasa (4/6/2024).

Di samping itu, Arifin menyampaikan bahwa penyakit mulut dan kuku (PMK) yang melanda hewan ternak di Indonesia sekitar dua tahun lalu, saat ini sudah terkendali. Dia mengatakan DKPP Provinsi Jawa Barat memiliki Tim Penyakit Menular Strategis yang memantau seluruh isu penyakit menular pada hewan.

"Di Jawa Barat kondisinya aman, hanya PMK. Kemarin juga ada LSD (lato-lato), tetapi sudah terkendali karena vaksin dan pengobatan tetap kita lanjutkan," ucapnya.

Untuk memastikan hewan kurban di wilayahnya dalam keadaan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), pihaknya menerjunkan 5.000 pemeriksa hewan yang tersebar di 27 kota dan kabupaten.

Arifin menyebutkan tim pemeriksa hewan kurban ini terdiri atas 1.300 petugas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kota/kabupaten, serta 4.000 mahasiswa, dokter hewan dan akademisi.


"Kami juga sudah melakukan pelatihan juru penyembelih hewan melalui daring dan luring. Hampir 500 orang yang sudah mengikuti pelatihan ini," ujarnya.

### Bursa Hewan Qurban

Sementara, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pemerintah Kota Bogor memfasilitasi peternak untuk menjual hewan kurban di Bursa Hewan Qurban (BHQ) yang diselenggarakan di Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) Kota Bogor.

Kepala BSIP Fadry Djufray mengatakan, BHQ digelar dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat mendapat tempat penjualan hewan yang layak.

Para peternak juga didampingi oleh dokter hewan dan paramedik yang memantau terus kondisi kesehatan hewannya. **(Kismi Dwi Astuti, Novianti Nurulliah)\*\*\***

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Mei 2024 NTP Jawa Timur Naik 096 Persen | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                             |  |
| Media  | Harian Bhirawa                          |  |
| Page   | 8                                       |  |
| Author | Rac.gat                                 |  |

## Mei 2024, NTP Jatim Naik 0,96 Persen

### Pemprov, Bhirawa

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan adalah indikator Nilai Tukar Petani (NTP). NTP Jawa Timur pada bulan Mei 2024 naik sebesar 0,96 persen dari 107,58 menjadi 108,61.

Hal ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It) mengalami kenaikan sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami penurunan. It naik sebesar 0,95 persen sedangkan Ib turun sebesar 0,01 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Zukipli mengatakan, jika dilihat perkembangan masing-masing subsektor pada bulan Mei 2024, dua subsektor pertanian mengalami kenaikan NTP dan tiga subsektor lainnya mengalami penurunan.

Subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi yaitu subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,47 persen dari 104,69 menjadi 106,23, diikuti subsektor Peternakan sebesar 0,98 persen dari 104,61 menjadi 105,64.


“Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan NTP terdalam yaitu subsektor Perikanan sebesar 0,69 persen dari 94,89 menjadi 94,23, diikuti subsektor Hortikultura sebesar 0,28 persen dari 130,69 menjadi 130,32, dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,12 persen dari 108,43 menjadi 108,30,” paparnya.

Ia juga memaparkan, Pada Mei 2024 terjadi kenaikan NTP (Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan) sebesar 1,47 persen. Hal ini terjadi karena It mengalami kenaikan sebesar 1,39 persen sedangkan Ib turun sebesar 0,09 persen.

Kenaikan It pada Mei 2024 disebabkan oleh naiknya indeks yang diterima petani pada kelompok Padi sebesar 2,68 persen yang disumbang oleh komoditas gabah. Sedangkan kelompok Palawija turun sebesar 1,50 persen yang disumbang oleh komoditas jagung, ketela pohon, dan ketela rambat.

Penurunan Ib sebesar 0,09 persen, yaitu dari 123,92 menjadi 123,81 disebabkan oleh turunnya Indeks KRT sebesar 0,17 persen sedangkan Indeks BPPBM naik sebesar 0,11 persen.

Kemudian pada Mei 2024, NTPH (Nilai Tukar Petani Hortikultura) mengalami penurunan sebesar 0,28 persen. Hal ini terjadi karena It turun sebesar 0,25 persen sedangkan Ib naik sebesar 0,03 persen. [rac.gat]

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | Penghargaan bagi ASN dan Bantuan Pertanian Warnai Harlah Pancasila | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024  |  |
| Media  | Fajar Makasar  |  |
| Page   | 5  |  |
| Author | Shd/iad  |  |

## Penghargaan bagi ASN dan Bantuan Pertanian Warnai Harlah Pancasila

**BELOPA, FAJAR** - Upacara bendera, dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila dilaksanakan di lapangan Andi Djemma Belopa, Senin, 3 Juni 2024. Bertindak selaku inspektur upacara. Pj. Bupati Luwu, Drs. H. Muh. Saleh, MSI.

Upacara bendera diikuti dari unsur TNI-Polri, ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu, Siswa-Siswi SMA, Organisasi Pemuda Pancasila, Senkom, dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya.

Dalam pelaksanaan Upacara, Pj. Bupati Luwu menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan penyerahan piagam penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Purnabakti TMT Pensiun 1 Maret - 1 Juni 2024.

"Kepada PNS Purnabakti 2024 periode ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu, saya mengucapkan penghargaan serta ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdianya

selama menjadi ASN di Pemkab Luwu. Bagi PNS yang menerima kenaikan pangkat, saya ucapkan selamat semoga menjadi motivasi untuk bekerja lebih profesional," ucap H Muh Saleh.

Penyerahan penghargaan KORPRI bagi PNS Purnabakti TMT pensiun 1 Maret - 1 Juni 2024 sebanyak 45 orang. Sedangkan Kenaikan Pangkat Periode Juni 2024, Golongan III sebanyak 125 orang dan Golongan IV sebanyak 61 orang.


Selain itu, Pj. Bupati

Luwu juga menyerahkan bantuan dari Menteri Pertanian RI kepada petani yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor senilai Rp14,4 miliar. (shd/iad)



**PENUH MAKNA**

Pj Bupati Luwu, H. Muh Saleh menjadi inspektur upacara Hari Lahir Pancasila di lapangan Andi Djemma Belopa, Senin, 3 Juni 2024.

|        |                                    |  |
|--------|------------------------------------|--|
| Title  | Wajo Dapat 71622 Ton Pupuk Subsidi | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                        |  |
| Media  | Fajar Makasar                      |  |
| Page   | 10                                 |  |
| Author | Man/zuk                            |  |

## Wajo Dapat 71.622 Ton Pupuk Subsidi

**SENGKANG, FAJAR** — Kabupaten Wajo menerima alokasi besar pupuk subsidi untuk 2024. Total alokasi mencapai 32.900 ton Urea dan 38.722 ton NPK. Alokasi ini tersebar di 14 kecamatan.

"Rata-rata, setiap kecamatan mendapat ribuan ton. Namun, Kecamatan Belawa menjadi yang tertinggi dengan alokasi 3.626 ton pupuk urea," ujar

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Wajo, Muhammad Ashar, kemarin.

Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk subsidi urea ditetapkan sebesar Rp2.250 per kilogram atau Rp112.500 per sak (50 kilogram), sementara untuk NPK dijual seharga Rp2.300 per kilogram atau Rp115.000 per sak.

Meski demikian, masyarakat mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPH-Bun) Sulsel, Imran Jauzi, mengakui adanya laporan tersebut. Ia bahkan mencatat adanya kenaikan harga di masyarakat.

"Untuk pupuk subsidi, terdapat distributor hingga pengecer. Laporan lapangan menunjukkan ada perubahan harga karena biaya distribusi," jelas Imran Jauzi.

TPH-Bun Sulsel telah melakukan pengawasan ketat untuk memastikan pupuk subsidi tersedia bagi masyarakat. Hasil evaluasi selalu dilaporkan ke Kementerian Pertanian (Kementan) dan berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia untuk penindakan terhadap distributor atau pengecer yang tidak sesuai.

"Pengawasan terus kami lakukan. Kami turun ke lapangan dan mengumpulkan keluhan masyarakat untuk dilaporkan ke Kementan. Jika ada distributor nakal, izinnnya bisa dicabut berdasarkan laporan kami," tambahnya.

Pemprov Sulsel telah menetapkan HET untuk pupuk. Urea seharga Rp2.500 per kilogram, NPK seharga Rp2.300 per kilogram, NPK formula khusus Rp3.300 per kilogram, dan pupuk organik Rp800 per kilogram. (man/zuk)

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| Title  | Beras Medium Naik Jadi Rp12.500/Kg |
| Date   | 5 Juni 2024                        |
| Media  | Pos Kota                           |
| Page   | 9                                  |
| Author | Ham                                |



Kementerian Pertanian

### ◆ Relaksasi HET Diperpanjang

# Beras Medium Naik Jadi Rp12.500/Kg

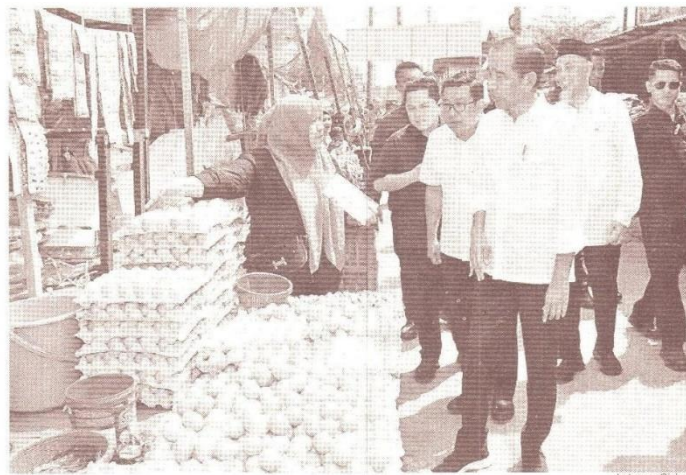
**JAKARTA (Poskota)** - Pemerintah kembali memperpanjang relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan beras premium. Keputusan ini berlaku sampai dibentuknya aturan resmi Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) terkait HET beras.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan perpanjangan relaksasi HET ini merupakan bagian dari upaya mengatasi tantangan pasokan dan harga pangan di tengah fluktuasi harga komoditas global dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi.

"Perpanjangan relaksasi HET beras ini diberlakukan pada hari ini sampai regulasi baru terkait HET dalam bentuk Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) sebagai perubahan Perbadan 7 tahun 2023 terbit," ujar Arief dalam keterangannya, Selasa (4/6/2024).

Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau Pasar Senggol, Dumai, Riau, Sabtu (1/6/2024). Kepala Negara menegaskan kebijakan HET beras menyesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual saat ini di mana faktor agroinput yang membentuk dan mempengaruhi harga beras.

"Harga eceran tertinggi itu sulit turun, meskipun



Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau Pasar Senggol, Dumai, Riau, Sabtu (1/6/2024).

produksi panen raya sudah melimpah. Karena memang biaya agroinput, biaya petani, sewa lahan, pokok, tenaga kerja, semuanya naik," kata Presiden Jokowi.

Melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada stakeholder beras Nomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024, perpanjangan Relaksasi HET Beras Premium dan Beras Medium berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

"Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha dan petani, sekal-

igus memberikan jaminan kepada konsumen untuk mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau," terang Arief.

Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan asosiasi pedagang beras, untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

#### HET Beras Premium

Adapun besaran relaksasi HET beras premium sesuai wilayah secara rinci sebagai berikut: Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan relaksasi HET sebesar Rp 14.900 per kilogram (kg) dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg.

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET sebesar Rp 15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.400 per kg.

Bali dan Nusa Tenggara Barat relaksasi HET sebesar Rp 14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg. Nusa Tenggara Timur relaksasi HET sebesar Rp 15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.400 per kg. Sulawesi relaksasi HET sebesar Rp 14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg.

Kalimantan relaksasi HET sebesar Rp 15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.400 per

kg. Maluku relaksasi HET sebesar Rp 15.800 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.800 per kg. Papua relaksasi HET sebesar Rp 15.800 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.800 per kg.

Sementara untuk beras medium, relaksasi HET sebagai berikut: Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan relaksasi HET sebesar Rp 12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 10.900 per kg.


Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET sebesar Rp 13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 11.500 per kg.

Bali dan Nusa Tenggara Barat relaksasi HET sebesar Rp 12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 10.900 per kg. Nusa Tenggara Timur relaksasi HET sebesar Rp 13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 11.500 per kg. Sulawesi relaksasi HET sebesar Rp 12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 10.900 per kg.

Kalimantan relaksasi HET sebesar Rp 13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 11.500 per kg. Maluku relaksasi HET sebesar Rp 13.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 11.800 per kg. Papua relaksasi HET sebesar Rp 13.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 11.800 per kg. (\*ham)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

|        |  |   |
|--------|--|---|
| Title  | Pemerintah Perpanjang Relaksasi HET Beras Premium dan Medium |  |
| Date   | 5 Juni 2024  |   |
| Media  | Cianjur Ekspres  |   |
| Page   | 1 Part 1   |   |
| Author | Jp/Sri   |   |




**ATURAN BARU:** Rusnawati memotret KTP warga yang membeli gas elpiji 3 kg di kawasan Krembangan, Surabaya (2/6).

## Pemerintah Perpanjang Relaksasi HET Beras Premium dan Medium

**PEMERINTAH** memperpanjang relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium dan medium. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga stabilitas harga beras premium dan medium di pasar tradisional dan ritel modern.

■ bersambung ke halaman 2

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | Pemerintah Perpanjang Relaksasi HET Beras Premium dan Medium | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024  |  |
| Media  | Cianjur Ekspres  |  |
| Page   | 1 Part 2   |  |
| Author | Jp/Sri   |  |

# Pemerintah Perpanjang...

**dari halaman 1**

Perpanjangan relaksasi HET beras tersebut sesuai dengan surat bernomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024. Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, perpanjangan relaksasi HET beras merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan pasokan dan harga pangan. "Perpanjangan relaksasi HET beras ini diberlakukan sampai regulasi baru terkait HET dalam bentuk peraturan Badan Pangan Nasional (perbadan) sebagai perubahan Perbadan No 7 Tahun 2023 terbit," terang dia kemarin (3/6).

Untuk diketahui, relaksasi HET beras sebelumnya hanya berlaku hingga 31 Mei. "Ada batas waktu berlakunya relaksasi ini," katanya.

Dengan perpanjangan tersebut, HET relaksasi beras premium untuk Jawa tetap Rp 14.900 dan beras medium Rp 12.500. Harga di Jawa sama dengan di Lampung

dan Sumatera Selatan (lihat grafis).

Menurut Arief, keputusan tersebut sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi untuk menyesuaikan HET beras berdasar situasi dan kondisi. Salah satu pertimbangannya terkait agroinput dan biaya lain yang membentuk harga beras. "Kami berharap masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau, tapi juga memberikan kelenturan kepada pelaku usaha dan petani," ujarnya.

Untuk implementasi relaksasi HET beras premium dan medium tersebut, Bapanas berharap Satgas Pangan Polri secara bersama-sama melakukan pengawasan berkala. "Bersama semua kementerian terkait untuk mengecek pasar tradisional dan ritel modern," ujarnya.

Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menuturkan, HET beras memang sulit untuk dikembalikan ke harga

semula. Hal itu disebabkan kenaikan struktur ongkos produksi beras. "Perlu diketahui, harga gabah itu naik karena cost structure," paparnya.

Kenaikan itu terjadi di banyak komponen. Mulai biaya sewa lahan, ongkos tenaga kerja, biaya sewa alat pertanian, hingga biaya lainnya. "Bapanas sudah mengundang banyak pihak, dari Kementan, BPS, HKTII, dan LSM juga untuk soal harga," ujarnya kemarin.

Saat ini tinggal menunggu berapa harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. Ada beberapa usulan, mulai Rp 6.500 per kilogram hingga Rp 7.000 per kilogram. Bahkan, petani menuntut harga Rp 7.200. "Saya yakin masih dipertimbangkan HPP gabah Rp 7 ribu," katanya.

Namun, setelah dihitung, HPP gabah Rp 7 ribu akan mendongkrak harga beras di kisaran lebih dari Rp 14 ribu. Menurut dia, harga ideal HPP gabah di kisaran Rp 6 ribu. **(jp/sri)**

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| Title  | Petani Bakal Dibagikan Pompa Air |
| Date   | 5 Juni 2024                      |
| Media  | Radar Lombok                     |
| Page   | 7                                |
| Author | Der                              |



# Petani Bakal Dibagikan Pompa Air

**TANJUNG**--Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) KLU terus berupaya meningkatkan hasil panen padi.



DERY HARJAN/RADAR LOMBOK  
Tresnahadi

Salah satunya dengan memberikan bantuan pompa air kepada kelompok petani. Kepala DKP3 KLU Tresnahadi mengatakan bahwa pada tahun ini ada bantuan irigasi perpompaan dari pemerintah pusat berupa 7 mesin pompa air beserta perlengkapan. Itu nanti disalurkan kepada kelompok petani. "Kelompok tani mana saja, itu nanti kita putuskan," ujarnya, Selasa (4/6).

Bantuan ini bagian dari upaya antisipasi menghadapi musim kemarau, yang kerap menjadi tantangan bagi para petani di daerah Dayan Gunung. Dilihat dari jumlah bantuan yang diberikan memang masih minim. Untuk itu pihaknya sudah mengusulkan tambahan 72 pompa air untuk para petani ke Kementerian Pertanian.


Hal itu jelasnya untuk mendukung program pemerintah dalam perluasan areal tanam (PAT) padi supaya bisa meningkatkan hasil produksi padi.

Diakui bahwa untuk luas areal sawah, saat ini mencapai 4.900 hektare. Namun tidak semuanya bisa ditanami padi karena kondisi air minim.

Untuk itu, Tresnahadi berharap agar usulan pengadaan 72 pompa air ini segera direalisasikan oleh Kementerian Pertanian sehingga 72 kelompok tani yang tersebar di KLU dapat segera memanfaatkan fasilitas tersebut. "Kami optimis dengan adanya tambahan pompa air ini luas areal tanam padi meningkat dan produksi padi juga meningkat," ungkapnya.

Selain itu pihaknya juga berharap dapat memberikan solusi yang berkelanjutan bagi para petani dalam menghadapi tantangan musim kemarau.

Pengadaan pompa air ini lanjut dia bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan sektor pertanian yang lebih produktif. **(der)**

|        |                                      |  |
|--------|--------------------------------------|--|
| Title  | Warga Jatihurip Terima Bantuan Beras | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                          |  |
| Media  | Sumedang Ekspres                     |  |
| Page   | 3                                    |  |
| Author | Ahm                                  |  |



ISTIMEWA

**SALURKAN:** Staf Pemerintahan Desa Jatihurip Enang Santoni bersama rekannya saat memberikan bantuan beras kepada warga di Aula Desa Jatihurip, baru-baru ini.

# Warga Jatihurip Terima Bantuan Beras

**KOTA** – Sebanyak 836 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara, mendapatkan bantuan beras 10 Kg, dari Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog melalui PT Pos. Kegiatan penyaluran dilaksanakan dimulai sejak Senin (3/6).

Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Jatihurip, Tata, melalui Staf Pemerintahan Desa Jatihurip, Enang Santoni kepada Sumeks, baru-baru ini. "Alhamdulillah pada hari Se-

nin (3/6) Kami Pemerintahan Desa Jatihurip mulai menyalurkan beras 10 Kg, bantuan dari Bapanas yang bekerjasama dengan Bulog melalui PT Pos sebanyak 836 KPM kepada warga sesuai data yang diterima dari Kantor Pos," kata Enang.

Ia juga mengatakan, untuk kuota bantuan beras tahun 2024 di Desa Jatihurip ada pengurangan sekitar 534 KPM, dimana pada tahun 2023 bantuan beras yang bersumber dari Bantuan Pangan Non Tunai kami (BPNT) mendapat-

kan kuota sebanyak 1370 KPM, dan kini dari Bapanas hanya mendapat 836 KPM.

"Adanya pengurangan kuota tersebut awalnya ada gejolak di warga tapi setelah ada penjelasan dari bpk Kades dan para perangkat warga bisa mengerti bahwa sumber bantuannya berbeda," ucapnya.

Lebih jauh Enang mengatakan, terkait sistem penyaluran bantuan beras di desanya dengan cara melibatkan Ketua RT dan RW,

"Jadi perangkat desa yang tu-

run kelapangan, dengan cara begini lebih efektif dan lebih cepat penyalurannya," ujarnya.

Enang berharap kepada pemerintah, kuota bantuan beras bagi warganya yang bersumber dari Bapanas tersebut bisa ditambah lagi.

"Untuk penambahan kuota ini disesuaikan dengan jumlah penduduk yang mencapai 11000 lebih, jelasnya untuk kedepannya harus ditambah lagi kuotanya, dan hal ini juga sesuai hasil cek ricek dilapangan masih banyak warga kami yang tidak mampu


belum mendapatkan," imbuhnya.

Enang juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah membantu warganya.

"Saya atas nama warga Desa Jatihurip sangat bersyukur dan berterimakasih kepada pihak Pemerintah dan Intansi terkait, atas bantuan beras yang diberikan ke warga Desa Jatihurip, karena ini sangat membantu perekonomian warga, dan mudah-mudahan adanya bantuan ini warga Jatihurip bisa lepas dari angka kemiskinan," tutupnya. (ahm)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | 59 PKS Genjot Produksi Kelapa Sawit di Sumsel | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                                   |  |
| Media  | Radar Palembang                               |  |
| Page   | 3   |  |
| Author | Spt   |  |



PELATIHAN: Sebanyak 59 pekebun kelapa sawit perwakilan Kabupaten Musi Banyuasin mengikuti pelatihan Manajemen dan Administrasi Keuangan dalam Rangka Pelatihan Pengembangan SDM PKS Tahun 2024.

PALEMBANG, RP – Sebanyak 59 pekebun kelapa sawit perwakilan Kabupaten Musi Banyuasin mengikuti pelatihan Manajemen dan Administrasi Keuangan dalam Rangka Pelatihan Pengembangan SDM PKS Tahun 2024. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan produksi kelapa sawit.

Para pekebun kelapa sawit dinilai penting memiliki kemampuan manajemen dan administrasi keuangan, mengingat kebun kelapa sawit di Sumatera Selatan (Sumsel) seluas 1,4 juta hektar, dan sebagian besar mata pencaharian masyarakat dari kebun kelapa sawit, maka edukasi dinilai penting.

Trainer dan Dosen Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Ir. Dwi Rachmina M.Si., mengatakan para pekebun diajarkan membuat report seluruh aktivitas perkebunannya, yang nantinya bisa jadi evaluasi.

“Dari sini nantinya pekebun bisa melihat bagaimana pengelolaan kebunnya, pupuk, tenaga kerja, obat-obatan, dan termasuk untung atau tidak,” katanya di sela pelatihan kepada 59 pekebun perwakilan Kabupaten Musi Banyuasin di Hotel Emilia, Selasa (4/6/2024).

Menurutnya, tak hanya mengevaluasi hasil dari kegiatan perkebunan kelapa sawit, dari sisi bisnis yang dikelola oleh KUD dengan baik, berpengaruh pada meningkatnya produksi panen kelapa sawit.

“Tak hanya soal teknis memilah bibit, tapi pekebun juga harus paham manajemen dan administrasi keuangan,” katanya.


Sementara itu, Direktur Perlindungan Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Hendratmojo Bagus Hudoro mengatakan, cara mengolah keuangan penting bagi pekebun untuk meminimalisir

pengeluaran dana dan memaksimalkan pendapatan.

“Jika manajemen pekebun tidak baik, ini akan berdampak pada hasil produksi buah. Karena saat ini saja kontribusi total ekspor Rp640 triliun di 2023, diantaranya Rp440 triliun dari perkebunan dan diantaranya 80 persen dari kelapa sawit,” jelasnya.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Agus Darwa mengatakan, setelah dua kali dilakukan pelatihan, setidaknya ada 1.250 pekebun yang teredukasi.

Agus mengatakan, dengan luas kebun kelapa sawit di Indonesia 16,4 juta hektar, diantaranya total 1,4 juta hektar (termasuk milik masyarakat), artinya Sumsel menyumbang ekspor sekitar 10 persennya. “Maka Sumsel sebagai penghasil sawit, sudah seharusnya pekebunnya teredukasi dengan baik,” pungkasnya. (spt)

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | Pemerintah Perpanjang Relaksasi HET Beras Premium dan Medium | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024  |  |
| Media  | Radar Bandung  |  |
| Page   | 3  |  |
| Author | Idr/c7/fal   |  |

# Pemerintah Perpanjang Relaksasi HET Beras Premium dan Medium

JAKARTA - Pemerintah memperpanjang relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium dan medium. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga stabilitas harga beras premium dan medium di pasar tradisional dan ritel modern.

Perpanjangan relaksasi HET beras tersebut sesuai dengan surat bernomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024. Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, perpanjangan relaksasi HET beras merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan pasokan dan harga pangan. "Perpanjangan relaksasi HET beras ini diberlakukan sampai regulasi baru terkait HET dalam bentuk peraturan Badan Pangan Nasional (perbadan) sebagai perubahan

Perbadan No 7 Tahun 2023 terbit," terang dia.

Untuk diketahui, relaksasi HET beras sebelumnya hanya berlaku hingga 31 Mei. "Ada batas waktu berlakunya relaksasi ini," katanya.

Dengan perpanjangan tersebut, HET relaksasi beras premium untuk Jawa tetap Rp 14.900 dan beras medium Rp 12.500. Harga di Jawa sama dengan di Lampung dan Sumatera Selatan (lihat grafis).

Menurut Arief, keputusan tersebut sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi untuk menyesuaikan HET beras berdasar situasi dan kondisi. Salah satu perimbangannya terkait agroinput dan biaya lain yang membentuk harga beras. "Kami berharap masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau, tapi juga memberikan kelenturan ke-



**BERAS:** Pengunjung melihat beras di salah satu gerai ritel modern di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (25/3) lalu.

pada pelaku usaha dan petani," ujarnya.

Untuk implementasi relaksasi HET beras premium dan medium tersebut, Bapanas berharap Satgas Pangan Polri secara bersama-sama melakukan pengawasan berkala. "Bersama semua kementerian terkait untuk mengecek

pasar tradisional dan ritel modern," ujarnya.


Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menuturkan, HET beras memang sulit untuk dikembalikan ke harga semula. Hal itu disebabkan kenaikan struktur ongkos produksi beras. "Perlu diketahui,

harga gabah itu naik karena cost structure," paparnya.

Kenaikan itu terjadi di banyak komponen. Mulai biaya sewa lahan, ongkos tenaga kerja, biaya sewa alat pertanian, hingga biaya lainnya. "Bapanas sudah mengundang banyak pihak, dari Kementan, BPS, HKTI, dan LSM juga untuk soal harga," ujarnya.

Saat ini tinggal menunggu berapa harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. Ada beberapa usulan, mulai Rp 6.500 per kilogram hingga Rp 7.000 per kilogram. Bahkan, petani menuntut harga Rp 7.200. "Saya yakin masih dipertimbangkan HPP gabah Rp 7 ribu," katanya.

Namun, setelah dihitung, HPP gabah Rp 7 ribu akan mendongkrak harga beras di kisaran lebih dari Rp 14 ribu. Menurut dia, harga ideal HPP gabah di kisaran Rp 6 ribu. (idr/c7/fal)

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | Sebagian Peternak Sapi Anggap Program IB Merugikan | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024  |  |
| Media  | Suara Ntb  |  |
| Page   | 3  |  |
| Author | Bul  |  |

# Sebagian Peternak Sapi Anggap Program IB Merugikan

Mataram (Suara NTB) -

Sejumlah peternak mempersoalkan program Inseminasi Buatan (IB) untuk mempercepat kebuntingan kerap gagal. Program ini dianggap oleh sebagian peternak cukup merugikan, karena peternak sudah membayar, kendati oleh pemerintah digratiskan.

Udin, salah satu pemilik ternak di Kabupaten Lombok Timur mengaku ternak miliknya yang dipelihara oleh keaharannya beberapa kali gagal di IB.

"Sapi saya dua kali di IB, ndak bisa-bisa bunting. Saya pertanyakan kualitas sperma induk yang digunakan untuk IB, kita ndak tau apakah benar yang disuntikkan itu sperma atau air. Kan peternak ndak tau soal itu," katanya.

Padahal, jelas-jelas saat dilakukan IB, ternak miliknya sudah terindikasi birahi. Yang ditunjukkan dengan ciri-ciri fisik sapi nampak gelisah, sering mengeluarkan suara yang spesifik, sering men-

gibas-ngibaskan ekornya, vulva bengkak berwarna agak kemerahan, keluar cairan putih agak pekat pada alat reproduksi sapi.

"Apa iya, sampai dua kali di IB ndak bisa - bisa bunting ternaknya. Ini merugikan peternak, karena sekali IB harus mengeluarkan Rp200 ribu kepada petugas IB, paman saya sampai jual ternak betingnya karena ndak bisa bunting dengan IB, diganti dengan sapi jantan," tambahnya.

Udin juga mempertanyakan mana saja petugas IB yang ditugaskan oleh pemerintah yang dianggap gratis. "Kita ndak tau juga, mana

petugas IB yang benar-benar petugas pemerintah, atau petugas mandiri. Jangan-jangan program IB ini hanya bisnis," katanya.

Terpisah, Mad, salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Lombok Barat juga menyampaikan hal yang sama. Sejumlah peternak di wilayahnya juga mendengar informasi seringnya gagal program IB dari peternak-peternak lain.

"Peternak di tempat saya juga mendapatkan informasi soal kegagalan IB, peternak sudah bayar untuk IB, tapi tidak sukses. Jadi mikir-mikir peternak, soalnya bayar. Bay-

angkan kalau Rp200 ribu sekali IB, bagi peternak kan mahal ini," kata Mad.

Karena informasi dari pengalaman-pengalaman kegagalan IB yang didengar dari peternak lain yang sudah melakukan IB, peternak lainnya mengurungkan niat untuk IB ternak-ternak miliknya. Dan lebih memilih kawin ternaknya kawin secara alami.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah mendorong peningkatan populasi ternak melalui program Inseminasi Buatan (IB), salah satunya di provinsi NTB. IB merupakan teknologi yang digunakan dalam budidaya ternak untuk meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak, khususnya sapi.

IB dilakukan dengan memasukkan mani/semen ke dalam alat kelamin hewan betina sehat menggunakan

alat inseminasi, sehingga hewan tersebut menjadi bunting. Tujuan IB adalah meningkatkan angka populasi sapi ternak melalui peningkatan angka kelahiran dengan cepat dan teratur.

Terpisah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Muhammad Riadi mengatakan, N2 untuk IB dijamin kualitasnya. Bagi ternak yang gagal bunting setelah di IB menurutnya tergantung skill petugas IB.

"Mungkin waktu penyuntikannya tidak pas. Kadang-kadang peternak tidak sabar. Birahi sedikit saja sudah dipaksakan untuk IB, karena takut masa birahi ternaknya berakhir. Padahal ada aturan waktunya," katanya.

Kasus bayar IB kepada petugas IB ini, menurutnya bisa saja karena peternak



IB - Kegiatan IB pada sapi


menggunakan jasa petugas IB mandiri. Sebab, petugas IB mandiri ini membeli mani beku yang disuntikkan ke ternak. Bagi petugas IB yang ditugaskan melaksanakan program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) Kementerian Perta-

nian, pemerintah menyediakan insentif sebesar Rp25 ribu sekali suntik IB.

Namun program IB Si Komandan ini targetnya sedikit, kata Riadi. Tahun 2024 ini anggaran untuk insentif IB bahkan belum turun dari Kementerian Pertanian. (bul)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Pemerintah Perpanjang Relaksasi HET Beras | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                               |  |
| Media  | Batam Pos                                 |  |
| Page   | 16 Part 1                                 |  |
| Author | JP Group & Gustia Benny                   |  |

# Pemerintah Perpanjang Relaksasi HET Beras

Reporter : JP GROUP  
Editor : GUSTIA BENNY

JAKARTA (BP) - Pemerintah memperpanjang relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium dan medium. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga stabilitas harga beras premium dan medium di pasar tradisional dan ritel modern.

Perpanjangan relaksasi HET beras tersebut sesuai dengan surat bernomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal



F. SALAM TOYIBI/JAWA POS

PENGUNJUNG melihat beras di salah satu gerai ritel modern di kawasan Depok, Jawa Barat.

31 Mei 2024. Menurut Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, perpanjangan relaksasi HET beras merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan pasokan dan harga pangan. "Perpanjangan relaksasi HET beras ini diberlakukan sampai regulasi baru terkait HET dalam bentuk peraturan Badan Pangan Nasional (perbadan) sebagai perubahan Perbadan No 7 Tahun 2023 terbit," terangnya.


Untuk diketahui, relaksasi HET beras sebelumnya hanya berlaku hingga 31 Mei. "Ada batas waktu berlakunya relaksasi ini,"

katanya.

Dengan perpanjangan tersebut, HET relaksasi beras premium untuk Jawa tetap Rp14.900 dan beras medium Rp12.500. Harga di Jawa sama dengan di Lampung dan Sumatera Selatan.

Menurut Arief, keputusan tersebut sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi untuk menyesuaikan HET beras berdasarkan situasi dan kondisi. Salah satu pertimbangannya terkait agroinput dan biaya lain yang membentuk harga beras.

■ Baca **PEMERINTAH...** Hal 14

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Title  | Pemerintah Perpanjang Relaksasi HET Beras |  |
| Date   | 5 Juni 2024                               |   |
| Media  | Batam Pos                                 |   |
| Page   | 16 Part 2                                 |   |
| Author | JP Group & Gustia Benny                   |   |

# Pemerintah Perpanjang Relaksasi HET...

*Sambungan dari hal 16*

"Kami berharap masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau, tapi juga memberikan kelenturan kepada pelaku usaha dan petani," ujarnya.

Untuk implementasi relaksasi HET beras premium dan medium tersebut, Bapanas berharap Satgas Pangan Polri secara bersama-sama melakukan pengawasan berkala.

"Bersama semua kementerian terkait untuk mengecek pasar tradisional dan ritel mod-

ern," ujarnya.

Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menuturkan, HET beras memang sulit untuk dikembalikan ke harga semula. Hal itu disebabkan kenaikan struktur ongkos produksi beras. "Perlu diketahui, harga gabah itu naik karena *cost structure*," paparnya.

Kenaikan itu terjadi di banyak komponen. Mulai biaya sewa lahan, ongkos tenaga kerja, biaya sewa alat pertanian, hingga biaya lainnya.


"Bapanas sudah mengundang

banyak pihak, dari Kementan, BPS, HKTI, dan LSM juga untuk soal harga," ujarnya.

Saat ini tinggal menunggu berapa harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. Ada beberapa usulan, mulai Rp6.500 per kg hingga Rp7.000 per kg. Bahkan, petani menuntut harga Rp7.200.

"Saya yakin masih dipertimbangkan HPP gabah Rp7 ribu," katanya.


Namun, setelah dihitung, HPP gabah Rp7 ribu akan mendongkrak harga beras di kisaran lebih dari Rp14 ribu. (\*)

|        |                 |  |
|--------|-----------------|--|
| Title  | PRODUKSI JAGUNG | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024     |  |
| Media  | Neraca          |  |
| Page   | 6               |  |
| Author | Neraca          |  |



NERACA/Antarafoto/Heny Purba/agr/rwa

**PRODUKSI JAGUNG** : Pekerja memilah jagung di gudang jagung Kostrad, Neglasari, Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (4/6/2024). Badan Pusat Statistik memprediksi total produksi jagung pipilan kering (JPK) kadar air (KA) 14 persen pada Mei 2024 mencapai 0,63 juta ton dan pada Juni 2024 mencapai 0,66 juta ton.

|        |                               |  |
|--------|-------------------------------|--|
| Title  | PTPN I Dukung Swasembada Gula | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024                   |  |
| Media  | Neraca                        |  |
| Page   | 11                            |  |
| Author | Ant/gro                       |  |

# PTPN I Dukung Swasembada Gula

## NERACA

Lumajang – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I (Subholding Supporting Co) Regional 4 menargetkan produksi gula sebanyak 8 ton per hektare untuk mendukung swasembada gula di Indonesia.

"Musim panen tebu di lingkungan PTPN I telah dimulai dan kami mematu target program 8 ton gula per hektar (ha)," kata Region Head PTPN I Regional 4, Subagiyo, mengutip laman Antara .

Subagiyo menyebutkan beberapa langkah strategis yang akan dilakukan

PTPN I Regional 4 dalam rangka mencapai target program produksi 8 ton gula/ha, antara lain menerapkan agroinput secara tepat waktu serta perbaikan sistem manajemen air.

"Kami lakukan upaya pencapaian target produktivitas tebu 100 ton/ha.

Untuk itu sejumlah langkah strategik kami upayakan, salah satunya melalui penerapan agroinput tepat waktu serta perbaikan water management system," ungkap Subagiyo.

Menurut Subagiyo, secara khusus kebun Rojopolo HGU Lumajang PTPN I Regional 4 justru mampu


melampaui dua kali lipat dari target produktivitas yang telah ditetapkan.

"Secara taksasi, target produktivitas tebu di kebun Rojopolo HGU Lumajang berpotensi menyentuh angka 233,4 ton/ha dengan rendemen 8% dan proyeksi produktivitas gula mampu berada di angka 18,6 ton/ha," jelas Subagiyo.

Sementara itu, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely menyambut baik hasil panen tebu PTPN I Regional 4 yang meningkat di Kebun Rojopolo, yakni yield per hektare nya sudah dua

kali lipat sebelum tahun 2020. "Kami memiliki harapan besar kepada PTPN untuk dapat berkontribusi secara aktif dalam merealisasikan target tersebut di Kementerian BUMN maupun pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan," ujar Nely.

Nely juga berpesan kepada tim manajemen kebun PTPN I Regional 4 untuk tetap mengupayakan yang terbaik dalam menghadapi setiap tantangan operasional ke depannya untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. ● ant/gro

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | Bapanas Sebut Presiden Setujui Bantuan Beras 10 Kg Dilanjutkan | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024  |  |
| Media  | Neraca   |  |
| Page   | 6  |  |
| Author | Bari/Ant   |  |

## Bapanas Sebut Presiden Setujui Bantuan Beras 10 Kg Dilanjutkan

### NERACA

Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) bakal dilanjutkan, yang menyoar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

"Alhamdulillah, hari ini Bapak Presiden Jokowi telah memberikan persetujuan keberlanjutan bantuan pangan (bantuan pangan) beras untuk terus dikururkan kepada 22 juta keluarga se-Indonesia, berupa beras kualitas terbaik dari Bulog 10 kilogram per keluarga per 2 bulan," kata Arief dalam keterangan, seperti dikutip, kemarin.

Arief menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah menyetujui bantuan pangan beras diteruskan kembali setelah Juni nanti, tepatnya di bulan Agustus, Oktober, dan Desember pada tahun ini. "Jadi program pro rakyat ini di 2024 ini akan berlangsung lagi setelah Juni ini, tepatnya di Agustus, Oktober, dan Desember," ungkap Arief.


Menurut Arief, hal itu membuktikan bahwa kehadiran dan perhatian pemerintah yang terus menyokong perekonomian 22 juta keluarga penerima manfaat. "22 juta keluarga itu kalau secara individu bisa sampai sekitar 89 juta atau artinya hampir sepertiga rakyat Indonesia yang diberikan beras Bulog yang berkualitas baik dari pemerintah," sambungnya.

Ia menuturkan, keberlanjutan bantuan pangan beras itu menjadi hal penting, terlebih harga pangan secara global mulai menunjukkan adanya kenaikan, sehingga harus mulai bersiap dalam mengantisipasi hal tersebut. "Kita di Indonesia punya bantuan ini karena tidak ada negara lain yang memberikan bantuan pangan gratis dalam bentuk beras, kecuali Indonesia. Dengan instrumen ini, kita yakin dapat menjaga kondisi perberasan sekaligus inflasi nasional," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, mulai menggeliatnya harga pangan dunia ditunjukkan pada indeks harga pangan yang dirilis Food and Agriculture Organization (FAO) atau The FAO Food Price Index (FFPI) di awal Mei tahun ini. FFPI April tahun ini tercatat mulai mengalami kenaikan menjadi 119,1 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di 118,8 poin. Sementara FFPI di Januari 2024 tercatat 117,7 poin dan Februari 2024 di 117,4 poin.

Di ranah domestik, dengan adanya program bantuan beras terbukti memberi dampak positif pada pengendalian inflasi secara nasional, utamanya beras. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Arief, pada Februari 2024, inflasi beras secara bulanan berada cukup tinggi di angka 5,32 persen. Akan tetapi, tingkat inflasi beras tersebut melemah dengan di Maret 2024 menurun ke 2,06 persen dan April 2024 tercatat minus 2,72 persen.

Terbaru, inflasi beras di Mei 2024 kembali mengalami pelemahan menjadi minus 3,59 persen dengan andil terhadap inflasi minus 0,15 persen. Menurut Arief, kondisi itu dipengaruhi ketersediaan stok beras yang memadai disebabkan produksi beras dalam negeri 3 bulan terakhir cukup tinggi. Pada Maret 2024, produksi beras tercatat memiliki angka potensi 3,38 juta ton. Di April 2024 angka potensi di 5,31 juta ton dan Mei 2024 di 3,58 juta ton. @bari/ant

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Produksi Beras di Lebak Januari-Mei 2024 Surplus 74.559 Ton | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024   |  |
| Media  | Neraca  |  |
| Page   | 9   |  |
| Author | Ant   |  |

## Produksi Beras di Lebak Januari-Mei 2024 Surplus 74.559 Ton

### NERACA

Rangkasbitung - Produksi beras di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada Januari-Mei 2024 surplus 74.559 ton atau mencukupi untuk konsumsi ketersediaan pangan masyarakat selama 6,3 bulan ke depan.

"Kami berharap petani yang sudah memanen padi agar melakukan percepatan gerakan tanam guna mendukung kebijakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk mempertahankan ketersediaan pangan," kata Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar dalam keterangan di Rangkasbitung, Lebak, Senin (3/6).

Selama ini, petani Kabupaten Lebak dapat mempertahankan sebagai lumbung pangan di Provinsi Banten.

Mereka petani yang sudah memanen agar dapat mempercepat gerakan ta-

nam untuk meningkatkan produksi pangan, sekaligus mendongkrak pendapatan ekonomi.

Sebab, mereka petani di sini jika panen dijual dengan harga relatif baik hingga menembus Rp7.000-/kilogram gabah basah.

Bayangkan, jika produktivitas rata-rata 5 ton dengan harga Rp7.000/kilogram sehingga pendapatan petani sebesar Rp35 juta/hektare.

"Saya kira pendapatan sebesar itu tentu petani meraup keuntungan bersih Rp25 juta setelah dipotong biaya produksi Rp10 juta/hektare," katanya menjelaskan.

Ia mengatakan, produksi beras dari Januari-Mei 2024 di Kabupaten Lebak terealisasi sebanyak 122.239 ton atau 193.324 ton gabah kering.

Sedangkan, kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Lebak sebanyak 143.038 ton/tahun atau rata-rata 11.920 ton/-

bulan dengan penduduk 1,4 jiwa. Selama ini, kebutuhan beras yang terserap dari Januari-Mei 2024 sebanyak 47.679 ton, sehingga tersisa 74.559 ton atau surplus selama 6,3 bulan ke depan.

"Kami menjamin persediaan beras untuk kebutuhan konsumsi pangan masyarakat di daerah ini relatif aman dan terpenuhi hingga surplus 6,3 bulan itu," kata Deni.

Menurut dia, pihaknya mengapresiasi Kementerian Pertanian yang menyalurkan pompa sebanyak 265 unit untuk mendukung pompanisasi kepada kelompok tani sehingga dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) yang awalnya dua kali tanam dipastikan bisa menjadi tiga kali tanam selama setahun.

Peningkatan IP padi itu tentunya dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pangan jika terjadi musim kemarau bisa di-


gunakan pompanisasi untuk menyedot air permukaan aliran sungai.

"Kami menerima laporan bahwa target percepatan tanam pada Mei 2024 seluas 10.000 hektare, namun terealisasi hingga 11.000 hektare," katanya menjelaskan.

Ketua Kelompok Tani Sukabungah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Ruhiana mengatakan pihaknya saat ini masih memasok beras hasil petani ke sejumlah pasar tradisional di wilayah Banten.

Bahkan, pekan lalu memasok beras jenis medium ke Pasar Rangkasbitung sebanyak 30 ton dengan harga Rp11 ribu/kilogram, sehingga total Rp330 juta.

"Kami menampung beras dari anggotanya dan kemudian dijual ke pasar, sehingga dapat menggulirkan perputaran uang hingga ratusan juta rupiah per bulan," katanya menjelaskan. ●ant

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | 5.000 Orang Tim Pemeriksa Hewan Kurban Diterjunksan di Jawa Barat | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024   |  |
| Media  | Neraca  |  |
| Page   | 9   |  |
| Author | Ant   |  |

# 5.000 Orang Tim Pemeriksa Hewan Kurban Diterjunksan di Jawa Barat

## NERACA


Kota Bogor - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melepas sekitar 5.000 orang tim pemeriksa hewan kurban, yang diterjunksan ke 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat.

Bey di Balai Kota Bogor, Senin (3/6), menyebutkan, tim pemeriksa hewan kurban ini terdiri atas 1.300 petugas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kota/kabupaten, serta 4.000 orang mahasiswa, dokter hewan, dan akademisi.

Ia menyampaikan, ribuan petugas ini tak hanya memeriksa kesehatan hewan kurban, namun juga akan memberikan edukasi terkait kesehatan hewan kurban kepada pembeli dan penjual. Di mana hewan kurban harus memiliki kriteria aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

"Ya, ini upaya untuk menghindarkan dari penyakit itu. Sampai sekarang kan tidak ada penyebaran, tapi kan dikontrol di lapangan. Itu mohon tadi, pedagang juga proaktif untuk mendapatkan sertifikat (kesehatan hewan)," ujarnya.


Bey menegaskan, edukasi ini harus dilakukan di dua sisi. Masyarakat atau pembeli harus tahu apa yang perlu diperhatikan saat membeli hewan kurban, begitu juga para pedagang harus tahu hak dari pembeli mendapatkan hewan kurban yang sehat. ● ant

|        |                         |  |
|--------|-------------------------|--|
| Title  | HARGA KOPI PUNTANG NAIK | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024             |  |
| Media  | Neraca                  |  |
| Page   | 4                       |  |
| Author | Neraca                  |  |



NERACA/Anaradoto/Risan Al Farsi /rwa

**HARGA KOPI PUNTANG NAIK** : Buruh tani menjemur biji kopi puntang di Kaki Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/6/2024). Petani kopi di Gunung Puntang menyebutkan, harga biji kopi di Gunung Puntang naik menjadi Rp100.000 atau naik sebesar 30 persen dibandingkan Juni tahun lalu yang hanya Rp80.000 akibat meningkatnya permintaan dari berbagai kota di Indonesia.

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Pemerintah dan Universitas Tingkatkan Perkuat Industri Susu | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024   |  |
| Media  | Neraca  |  |
| Page   | 10  |  |
| Author | Gro   |  |

# Pemerintah dan Universitas Tingkatkan Perkuat Industri Susu

## NERACA

Yogyakarta – pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) dan Universitas Gajah Mada (UGM) untuk memperkuat industri persusuan nasional.

Produksi susu bukan hanya soal ekonomi tetapi juga berperan penting dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, mengingat susu adalah sumber protein vital untuk perkembangan otak dan kesehatan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Nasrullah menekankan pentingnya meningkatkan konsumsi susu di Indonesia sebagai langkah strategis untuk mencapai "Indonesia


Emas" 2045. "Mengonsumsi susu secara rutin bisa meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045," ujar Nasrullah di Fakultas Peternakan UGM, Yogyakarta.

Nasrullah menegaskan komitmen Kementan untuk terus mengembangkan komoditas peternakan, khususnya sapi perah, sebagai sumber protein hewani. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang berfokus pada peningkatan produksi komoditas nasional. "Kita tidak hanya fokus pada swasembada daging, tapi juga swasembada pro-

tein hewani, termasuk ternak perah yang menghasilkan susu," jelas Nasrullah.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, populasi sapi perah di Indonesia mencapai 514 ribu ekor dengan produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) sebesar 0,9 juta ton, sementara kebutuhan susu industri mencapai 4,3 juta ton.

Selain itu, terdapat 32 Industri Pengolah Susu (IPS) di Indonesia, dengan 14 di antaranya telah bermitra dengan peternak lokal menyerap SSDN. Nasrullah melihat ini sebagai peluang besar bagi para pelaku usaha peternakan dan investor untuk mengembangkan usaha sapi perah di Indonesia. ● gro

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | Pemprov Jabar Berupaya Mengalihkan Pertanian Konvensional ke Organik | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 5 Juni 2024  |  |
| Media  | Neraca   |  |
| Page   | 9  |  |
| Author | Ant  |  |

## Pemprov Jabar Berupaya Mengalihkan Pertanian Konvensional ke Organik

### NERACA

Garut - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan upaya untuk mengalihkan pertanian konvensional ke organik dalam rangka menyelamatkan kondisi lahan pertanian agar tetap sehat, produktif, berkualitas, dan ramah lingkungan, sehingga memberikan manfaat banyak bagi kehidupan makhluk hidup.

"Jadi kita coba tumbuhkan di masing-masing kota sesuai dengan potensinya, kemarin ada di Bandung, lalu di Garut, di Garut potensial," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Jabar Dadan Hidayat usai pertemuan dengan petani padi organik di Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Selasa (28/5).

Ia menuturkan pertanian organik di Jabar bukan sesuatu yang baru melainkan sudah 13 tahun lalu dikembangkan, yang saat ini tercatat sudah ada lahan pertanian organik seluas 7 ribuan hektare, dari total pertanian di Jabar seluas 928.218 hektare.

Lahan pertanian organik itu, kata dia, masih harus terus diperluas ke seluruh kota/kabupaten yang lahannya memiliki potensi untuk pengembangan lahan organik.

Ia mengungkapkan alasan mendorong beralih pada pertanian organik, karena kondisi lahan saat ini berdasarkan laporan badan penelitian dan pengembangan (balitbang) sebesar 88 persen dalam kondisi sakit karena sudah lama cara pengolahannya tidak secara organik.

"Balitbang tanah itu mengatakan lahan pertanian pada sakit, ada yang sakit berat, sakit ringan, kemudian juga ada sakit setengah berat, kan itu saya simpulkan hampir 88 persen sakit, yang sehatnya 12 persen saja dari 928.218," katanya.

Ia menyampaikan alasan untuk beralih ke lahan pertanian organik karena produktivitas pertanian bukan organik di Jabar tidak terjadi peningkatan selama ini hanya di kisaran 5,6 dan 5,7 ton per hektare, tidak sampai 6 ton per hektare.

Sedangkan cara pengolahan pertanian organik, kata dia, hasilnya terus berkembang dan produktivitasnya semakin naik dengan biaya produksi rendah seperti yang sudah dilakukan di daerah lain di Bandung, kemudian di Yogyakarta.

"Padi organik ini cara kerjanya seperti mesin diesel, semakin panas semakin bagus, semakin lama menggunakan bahan organik produktivitas semakin tinggi, biaya produksi semakin rendah," katanya.

Ia mengatakan upaya mendorong pertanian organik itu dengan terus melakukan sosialisasi, dan mengedukasi kelompok tani menyampaikan berbagai manfaat dan kemudahan, serta hasilnya yang memuaskan dengan nilai harga jual lebih tinggi daripada hasil pertanian bukan organik.

Selama ini, lanjut dia, pertanian organik sudah mulai dikembangkan di 22 kabupaten/kota di Jabar, meskipun masih skala kecil, namun hal itu akan terus didorong agar lebih luas lagi dengan disiapkan berbagai dukungan dari pemerintah.

Ia menambahkan upaya mendukung pengembangan pertanian organik itu, salah satunya dengan menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik yang saat ini masih dibahas rancangannya oleh DPRD Jabar.

"Kita kan sekarang buat perda ini dalam rangka mengakselerasi, tantangan kita ke depan harus semakin sehat. Bagaimana menyiapkan pupuk pestisida dengan cara yang lebih sehat, terhadap petaninya, terhadap lingkungan," katanya. ● ant

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Title  | Petani Sawit Menjerit |
| Date   | 5 Juni 2024           |
| Media  | Pos Belitung          |
| Page   | 1 Part 1              |
| Author | W6/s21                |



BANGKA POST/SERI

**ORASI** - Koordinator Aksi Kelompok Petani Sawit Basel dan Bateng, Ruben Alfaroabi saat orasi di halaman depan Kantor Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Mereka menuntut dua pabrik kelapa sawit milik Tamron alias Aon dapat beroperasi kembali agar petani dapat menjual hasil panennya.

# Petani Sawit Menjerit

- ▶ Kesulitan Menjual Hasil Panen
- ▶ Massa Desak 2 Pabrik Sawit Milik Aon Beroperasi Kembali

Saat ini petani sudah menjerit karena terkendala menjual kelapa sawit.

**Ruben Alfaroabi**  
Koordinator Lapangan Aksi Damai

**PANGKALPINANG, POS BELITUNG** - Seratusan warga dari Persatuan Masyarakat Petani Kelapa Sawit dari Kabupaten Bangka Selatan (Basel) dan Bangka Tengah (Bateng) menggelar aksi damai di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin (3/6).

Aksi damai yang dilakukan tersebut, buntut pemblokiran dua rekening pabrik kelapa sawit milik Tamron alias Aon oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) beberapa waktu lalu.

Dua perusahaan sawit milik Aon itu adalah CV Mutiara Alam Lestari (MAL) dan CV Mutiara Hi-

jau Lestari, pemblokiran dilakukan oleh Kejagung lantaran Aon terjerat kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun.

Dengan tidak beroperasinya dua pabrik ini, para petani sawit kesulitan menjual hasil produksinya sehingga mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ruben Alfaroabi selaku koordinator lapangan aksi damai mengatakan mereka mewakili petani kelapa sawit menyampaikan keluhan

● Kehadaman 7

## UNJUK RASA PETANI SAWIT

- Petani sawit dari Basel dan Bateng unjuk rasa
- Menuntut 2 pabrik sawit milik Aon dibuka lagi
- Petani mengaku kesulitan menjual hasil panen
- Minta kepedulian dan solusi dari pemerintah

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Title  | Petani Sawit Menjerit |
| Date   | 5 Juni 2024           |
| Media  | Pos Belitung          |
| Page   | 1 Part 2              |
| Author | W6/s21                |



Kementerian Pertanian

## Petani

Sambungan Hal 1.

agar dapat didengar dan disampaikan kepada pihak terkait.

"Tuntutan kita, permohonan diberikan solusi terbaik terhadap kondisi yang kami alami saat ini petani sudah menjerit terkendala menjual kelapa sawit ini," kata Ruben, Senin (3/6).

Kelompok aksi ini juga meminta adanya perhatian, kepedulian dan solusi terbaik dari pemerintah dan lembaga terkait terhadap petani kelapa sawit, agar tidak hanya fokus pada proses hukum yang sudah dijalani saja.

"Kami juga perlu diperhatikan kesejahteraan kami selaku petani kelapa sawit, kami saat ini tidak bisa menjual buah kelapa sawit kami, karena dua pabrik tidak beroperasi akibat proses hukum," tegasnya.

"Jadi kami meminta dengan sangat bagaimana dua pabrik ini bisa beroperasi kembali tanpa melawan, menghambat dan menghalangi proses hukum yang berjalan," lanjut Ruben menjelaskan tuntutan aksi.

Kemudian, Ruben juga menegaskan, bahwa massa aksi petani kelapa sawit jubarakyat dan masyarakat sehingga sudah semestinya juga diperhatikan dan dipedulikan kesejahteraannya serta dijamin oleh pemerintah.

Ruben membeberkan, satu bulan terakhir ini petani kelapa sawit harus bertahan dengan cara menjual buah ke pabrik lain di Bangka Selatan yang tidak mumpuni karena dibatasi, sehingga banyak dikembalikan dan harganya terus menurun.

"Ini menjadi kendala kita, para petani merasa kesulitan, terhadap perekonomian sehari-hari," ungkapnya.

### Sampaikan ke Kejagung

Menanggapi aksi unjuk rasa dan keluhan petani kelapa sawit, Kasipenkum Kejati Babel Basuki Raha-

rjo mengaku mengapresiasi langkah yang dilakukan kelompok tersebut.

"Intinya menyampaikan tuntutan terkait dengan hasil sawit yang sampai saat ini tidak bisa diterima oleh PT MHL dan PT MAL," kata Basuki Rahrjo, Senin (3/6).

Lalu, terkait proses hukum terkait PT MHL dan CVMAL, Basuki menyatakan penanganan perkara ada pada tingkat Kejagung RI sehingga Kejati Babel tidak bisa banyak berkomentar.

"Kita terima tuntutananya, kita sampaikan ke Kejagung RI, cuma nanti dari sana pun mencari solusinya bagaimana terbaik, agar para petani bisa memanfaatkan hasil panen itu," sebutnya.

Surat dari kelompok petani sudah diterima Kejati Babel sejak hari Jumat lalu, yang di dalam surat itu ada tuntutan yang sudah disampaikan oleh koordinator lapangan aksi pada saat unjuk rasa.

"Tetap kita sampaikan, karena kita tidak dapat membenarkan keputusan di sini, karena penanganan perkara ada di Jampidsus Kejagung RI," tegas Basuki.

### Bertemu Korban PHK

Pada hari yang sama, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menerima audiensi perwakilan dari Ikatan Buruh Sawit Bangka Tengah di ruang kerjanya, Senin (3/6).

Audiensi ini menindaklanjuti kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami 659 karyawan PT Mutiara Hijau Lestari (MHL) dan CV Mutiara Alam Lestari (MAL), dua perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Tamron alias Aon.

Perwakilan dari karyawan yang terdampak menyampaikan beberapa hal kepada bupati, di antaranya harapan agar dua perusahaan dapat beroperasi kembali.

Namun jika memang tidak memungkinkan,

maka harapan akan hak-hak normatif seperti pesangon serta Jamsostek dapat segera dipenuhi.

Menanggapi hal tersebut, Algafry menyampaikan rasa simpatinya serta mengatakan telah menemui Pj Gubernur Babel, Safrizal ZA membahas mengenai hal ini.

Dan akan lanjutkannya pada rakor yang akan dilaksanakan di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (3/6) sore.

"Sore ini akan kita diskusikan lagi dengan Pak Pj Gubernur untuk mencari solusinya, dan akan kita usahakan agar segala hak-hak para pegawai dapat segera diterima," ujar Algafry.

Dirinya juga berharap agar semua pihak dapat bersabar dan berbesar hati.

"Teman-teman tadi juga telah menyampaikan beberapa hal yang perlu segera di-follow up Pemkab untuk dapat menjelaskan pada pihak-pihak terkait, seperti BPJS Kesehatan yang infonya tidak dapat digunakan. Tadi sudah langsung saya konfirmasi ke Kepala Dinkes, juga sudah dikoordinasikan dengan dinas terkait tentang surat permohonan yang akan diajukan kepada pihak bank terkait rekening pegawai. Harap bersabar, semoga permasalahan ini dapat segera kita atasi," pungkas Algafry.

### Kirim Surat ke Kejagung

Sementara pada Senin (3/6) sore, kepada Bangka Pos, Algafry mengungkapkan hasil pertemuan dengan Pj Gubernur Babel Safrizal ZA di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur.

Pertemuan itu kata Algafry dalam rangka membahas dan mencari solusi mengenai sekitar 659 pekerja sawit yang terkena pemutusan hubungan kerja.

"Kehadiran rapat koor-

dinasi dengan forkopimda provinsi sekaligus owner dua perusahaan itu yang saat ini karyawannya sudah berhenti bekerja. Kami menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kami waktu berkumpul di DPRD kemarin yaitu mereka berharap perusahaan ini bisa kembali beroperasi," ujar Algafry.

Dia mengatakan Pemkab juga menyampaikan agar perusahaan memperhatikan hak dan kewajiban terhadap pekerja yang terkena PHK.

"Kedua apapun yang terjadi setelah pasca ini, kondisi mereka diberhentikan, siapa yang akan menjadi penjamin hak-hak mereka bisa untuk diselesaikan," lanjutnya.

Dalam pertemuan itu, ada beberapa opsi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ini seperti adanya pihak ketiga diperkenankan mengoperasikannya.

"Tadi Pak Pj Gubernur sudah memberikan opsi-opsi kepada pihak perusahaan, pertama boleh tidak ada pihak ketiga yang melaksanakan ini, kalau bisa diminta pihak perusahaan untuk memberikan kemudahan itu tapi harus juga mendapatkan persetujuan dari Kejagung RI," ujarnya.

"Kalau pun nanti tidak ada pihak ketiga, apa yang diperlukan pihak provinsi untuk mencari modal untuk dalam operasionalnya agar perusahaan tetap berjalan," sambung Algafry.

Dia menambahkan langkah yang akan diambil untuk saat ini, Pj Gubernur akan berkinim surat kepada Kejagung RI.

"Kita masih menunggu ini, Pj Gubernur akan bersurat ke Kejagung RI berkaitan dengan apakah opsi yang ditawarkan bisa disepakati atau ada pendampingan dari Kejagung soal permohonan dari Pj Gubernur," tukasnya. (w6/s2)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN